



LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PEMBAGIAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2000
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA (KPPN) JEMBER

Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Persyaratan Akademik
pada Program Diploma III Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Asal:	Hasil Pembelian	tanggal	Klass
Oleh:	03 JUL 2006		677.46
NO. Induk :			FIR
KLASIFIKASI / PELAYANAN :			P

Anas Firmansyah

NIM : 020803104386/AKT

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI

2006

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PEMBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2000 PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Anas Firmansyah

NIM : 020803104386

Program Studi : Akuntansi

Jurusan : AKUNTANSI

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

5 Juni 2006

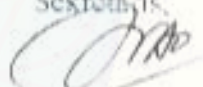
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji


Ketua,


Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak
NIP. 131 832 326

Sekretaris,


Drs. Wasito, M.Si, Ak
NIP. 131 966 372

Anggota,


Indah Purwanawati, S.Si, M.Si, Ak
NIP. 132 163 903



Mengetahui Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Drs. Karwedi, MM
NIP. 131 276 658



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta Shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan suatu kebahagiaan teriring sembah sujud dan terima kasih atas terselesainya sebuah karya kecil yang mungkin tiada arti namun sangat berarti untukku ini kepada:

- ❖ Ayahanda Ir. Sarwono & Ibunda Lilik Suli'ah SE. Yang senantiasa sabar dan tulus ihlas memberikan bimbingan dan perhatian serta untaian Do'a untuk ananda dalam menjalani kehidupan ini.
- ❖ Bapak Zainuri M.Si, Yang dengan ihlas tak pernah berhenti dan senantiasa memberi do'a, perhatian dan harapan selama ini.
- ❖ Adik-adikku Zunan Ari Mawardi, Luthfi Reza Maulinda, M. Rizqi Hariansyah atas keceriaan, kegembiraan dan hari-hari penuh arti dan do'a "ingat, Jangan lupa belajar dan raih cita-citamu setinggi-tingginya".
- ❖ Adikku Tarmila Puspitasari (Almh.) Yang telah memberikan, spirit, do'a, Kasih & Sayangnya. "Adik akan selalu tetap ada dihatiku".
- ❖ Ibu Hj. Soehardi Sekeluarga & anak-anak Batu 10 (Rinni, Dwi, Wulan, Mbak Vo'I, Mbak Andien) juga (Fandi, Tier, Nyit-nyit, P_tut, Citra) atas do'a & kebersamaannya "Batu 10 adalah kampus kedua bagiku".
- ❖ Sobatku Heny X-ta Indartanti. "Terima kasih atas semuanya".
- ❖ Rekan-rekan Diploma III Akuntansi 2002, I Love U All.
- ❖ Teman-teman PSRM "Sardiulo Anorogo" atas keguyuban, kebersamaan & kesempatan untuk berproses.
- ❖ Anak-anak "Poker Band", kita tetap "Numeru Uno".
- ❖ Dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya laporan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

*Banyak Baca, Banyak Tahu, Banyak Ilmu,
Makin Maju.*



10 atau 20 tahun lagi kamu akan tetap seperti sekarang kecuali dengan siapa kamu "begaul" dan buku apa yang telah kamu "baca"



AKU BERFIKIR MAKA AKU ADA, AKU BERANI MAKA KAMI CERDAS (DISCRETES)



MANUSIA DAPAT DIMATIKAN, MANUSIA DAPAT DIHANCURKAN TETAPI MANUSIA TIDAK DAPAT DIKALAHKAN SELAMA MASIH BERSETIA HATI KEPADA DIRINYA SENDIRI.



Maka ingatlah kamu kepadaKu niscaya Aku pun ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari Aku (QS. 2:153)

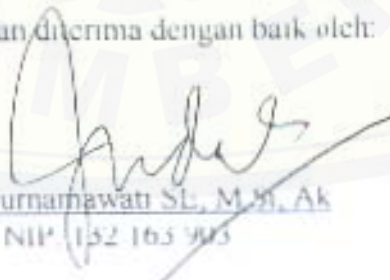


LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Anas Firmansyah
NIM : 020 803 104 286
Program Study : Akuntansi
Program Pendidikan : D III Ekonomi Universitas Jember
Dosen Pembimbing : Indah Purnamawati SE, M.Si, Ak.
Tempat Pelaksanaan : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember
Waktu Pelaksanaan : 1 Maret 2006 s.d. 3 April 2006
Judul Laporan : Prosedur Penatausahaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember.

Jember, Mei 2006

Disetujui dan diterima dengan baik oleh:


Indah Purnamawati SE, M.Si, Ak
NIP. 132 163 903

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul : **“Prosedur Penatausahaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember”**. Penulisan laporan ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh studi dan menyelesaikan gelar Diploma (So) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Keberhasilan penulisan Laporan ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat atas Nabi Muhammad SAW penulis mengucapkan terima kasih kepada :

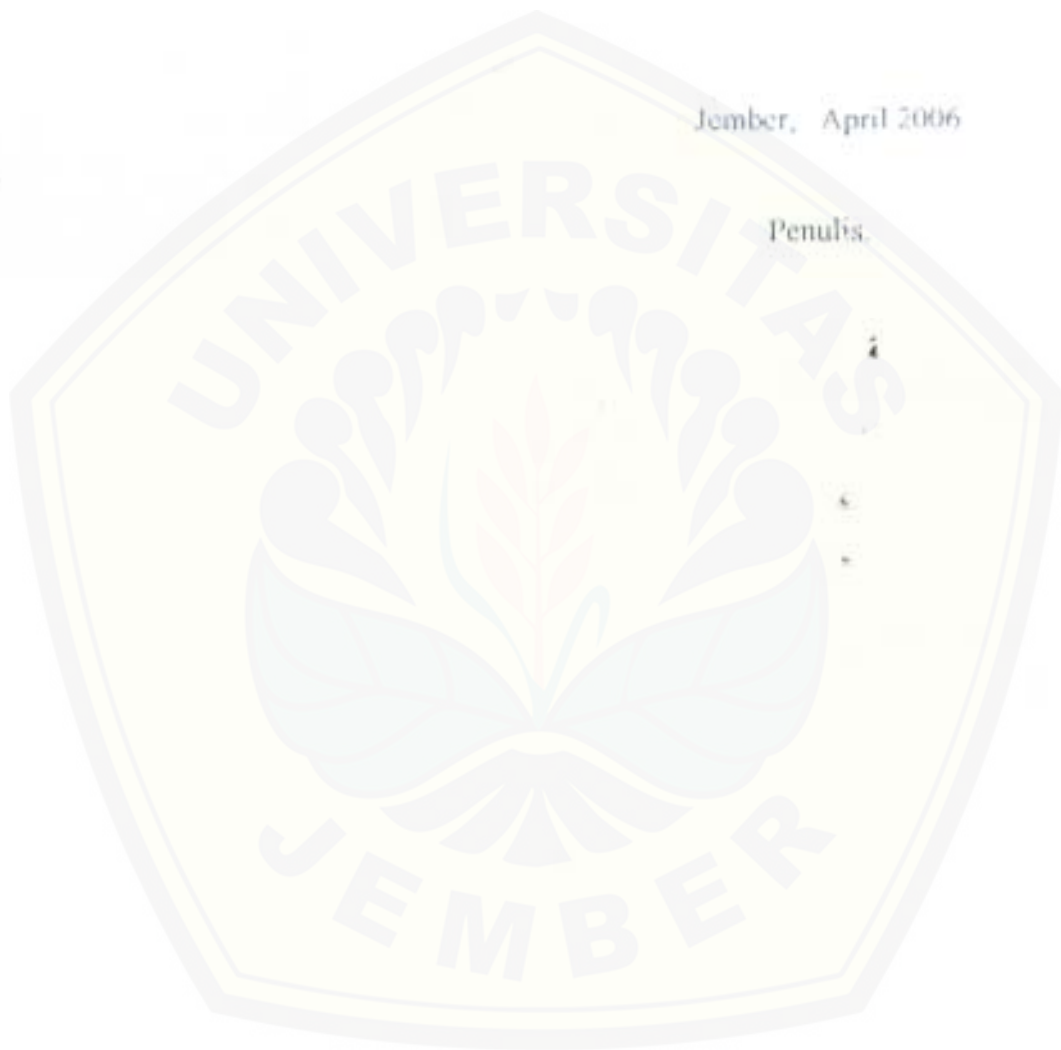
1. Bapak Drs. H. Sarwedi, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Ibu Indah Purnanawati SE, M.Si, Ak. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan laporan ini.
3. Bapak M. Muqdad MM, Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar di Jurusan Akuntansi FE.
5. Bapak Drs. Soetomo M.Si. Selaku Kepala Kantor KPPN dan segenap jajarannya yang telah memberikan waktu dan tempat melaksanakan PKN
6. Rekan-rekan Diploma III Akuntansi 2002, I Love U All.
7. Teman-teman PSKM "Sardulo Anorogo" Terima kasih atas ke "guyub"annya.
8. Anak-anak "Poker Band", kita tetap "Numeru Uno".
9. Dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya laporan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan spirit yang telah diberikan akan mendapat limpahan rahmat dan balasan yang lebih dari Allah SWT.

Sadar akan keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam laporan ini, dengan keterbukaan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Jember, April 2006

Penulis,



DAFTAR ISI

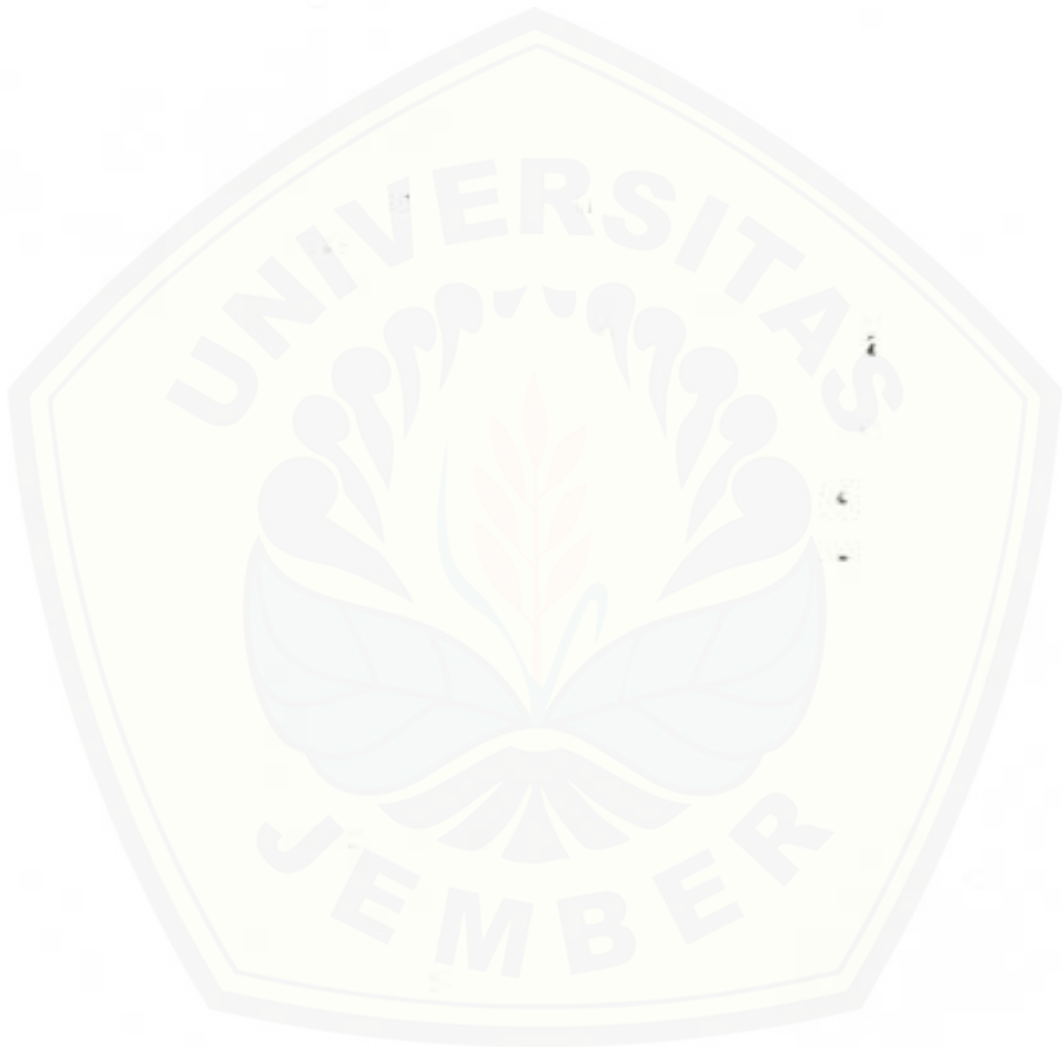
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
← DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Prosedur.....	7
2.2 Pengertian Kegiatan Tata Usaha.....	8
2.2.1 Kegiatan Tata Usaha.....	8
2.2.2 Ciri-ciri Kegiatan Tata Usaha.....	9
2.3 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).....	9
2.3.1 Pengertian Pajak.....	9
2.3.2 Fungsi Pajak.....	10
2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.3.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	10
2.3.5 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).....	11
2.3.6 Keberatan dan Banding.....	12

2.3.7	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	12
2.4	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13
2.4.1	Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	13
2.4.2	Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	14
2.4.3	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	15
2.4.4	Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	15
2.4.5	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	16
2.5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	17
2.5.1	Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	17
2.5.2	Objek Pajak	17
2.5.5	Perhitungan dan pembagian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).....	18
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	19
3.1	Latar Belakang Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember	19
3.2	Tugas dan Fungsi KPPN Jember.....	20
3.2.1	Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember	20
3.2.2	Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember	21
3.3	Struktur Organisasi	24
3.5	Kegiatan Usaha.....	28
BAB 4.	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....	30
4.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	30
4.2	Pelaksanaan Pembukuan, Pelimpahan Dan Pembagian PBB/BPHTB Oleh Pelaksana PBB/BPHTB.....	30
4.3	Tata Cara Pelimpahan Dan Pembagian PBB/BPHTB.....	31
4.4	Tata Cara Pencocokan Dan Penerimaan PBB/BPHTB.....	34
4.5	Perhitungan Pembagian PBB/BPHTB.....	34
4.5.1	Perhitungan Pembagian PBB	34

4.5.2	Perhitungan Pembagian BPHTB	36
4.6	Sanksi-sanksi.....	37
4.7	Prosedur penatausahaan Setoran dan pembagian PBB dan BPHTB Oleh KPPN	38
4.8	Deskripsi Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Di KPPN Jember	46
4.8.1	Kegiatan PKN di Seksi Perbendaharaan	46
4.8.2	Kegiatan PKN di Seksi Verifikasi dan Akuntansi.....	47
4.8.3	Kegiatan PKN di Seksi Bendahara Umum.....	47
4.8.4	Kegiatan PKN di Sub bagian Umum	48
BAB 5.	KESIMPULAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PKN	6
Tabel 3.1 Daftar Bank Persepsi dan BO III Wilayah Kerja KPFN Jember	26



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 2 : Surat kesediaan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
- Lampiran 3 : Daftar nilai hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).
- Lampiran 4 : Daftar Hadir kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- Lampiran 5 : Nota Debet atas Pembagian PBB untuk Propinsi.
- Lampiran 6 : Nota Debet atas Pembagian PBB untuk Kabupaten.
- Lampiran 7 : Nota Debet atas Pembagian PBB untuk Pusat/KPPN.
- Lampiran 8 : Nota Debet atas Pembagian PBB untuk Biaya Pemungutan.
- Lampiran 9 : Nota Debet atas Pembagian BPHTB untuk Propinsi.
- Lampiran 10 : Nota Debet atas Pembagian BPHTB untuk Kabupaten.
- Lampiran 11 : Nota Debet atas Pembagian PBB dari Bank Jatim.
- Lampiran 12 : Nota Kredit atas PBB.
- Lampiran 13 : Nota Kredit atas BPHTB.
- Lampiran 14 : Advis Debet Kredit Bank Indonesia atas pelimpahan penerimaan pajak untuk pemerintah pusat.
- Lampiran 16 : Slip Pengiriman Uang dari Bank Operasional.
- Lampiran 18 : Surat Pengantar pembukuan penerimaan/pengeluaran kiriman uang.
- Lampiran 19 : Surat pembukuan penerimaan/pengeluaran kiriman uang.
- Lampiran 20 : Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP) Perpajakan.
- Lampiran 21 : Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP) Pendapatan PBB.
- Lampiran 22 : Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP) Pendapatan BPHTB.
- Lampiran 23 : Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK).
- Lampiran 24 : Buku Bank untuk Bank Indonesia.
- Lampiran 25 : Buku Bank untuk SPM Nihil.
- Lampiran 26 : Rekapitulasi Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Pajak untuk wilayah kerja KPPN.
- Lampiran 27 : Rekapitulasi Pelimpahan Pembagian Pajak Pada Bank Indonesia.

- Lampiran 28: Laporan Akhir Harian bank Indonesia.
- Lampiran 29: Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Pajak pada PT. Pos Indonesia.
- Lampiran 30: Routing Slip Untuk KP PBB tentang Pembagian Penerimaan PBB.
- Lampiran 31: Konsep SP2D Untuk KP PBB tentang Pembagian Penerimaan PBB
- Lampiran 32: Surat Perintah Membayar Bea Pemungutan PBB (SPM-BP-PBB).
- Lampiran 34: Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan PBB (SPM-PHP-PBB).
- Lampiran 35: Kep. MenKeu RI Nomor: KEP-54/WPJ.12/KB.0705/2006 Tentang PHP-PBB untuk Pusat, Propinsi Jatim dan Kabupaten Jember.
- Lampiran 39: Daftar Penerimaan dan Pembagian PBB untuk wilayah kerja DPJ Jawa bagian timur KPPN Jember.
- Lampiran 40: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- Lampiran 41: Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)
- Lampiran 45: Kartu Konsultasi.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Krisis moneter di Indonesia yang berlangsung selama beberapa tahun ini telah membawa dampak yang sangat besar dan berat bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Menghadapi tantangan yang berat pada saat ini sebagai akibat situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan maka pemerintah diharapkan bisa melakukan usaha yang mengarah pada kegiatan dan program yang mendukung pemulihan ekonomi secara optimal dan menyeluruh.

Tuntutan yang mengacu pada keinginan untuk memperbaiki keadaan/ situasi yang lebih baik membuat pemerintah berusaha memaksimalkan potensi daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. Dengan terbentuknya Pemerintah Daerah diharapkan terciptanya optimalisasi pendapatan asli daerah yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah tersebut.

Reformasi politik dan ekonomi yang sudah terjadi sebagai imbas dari gerakan globalisasi ekonomi telah memunculkan perubahan-perubahan yang mendasar tentang orientasi, arah dan kebijakan pembangunan nasional. Termasuk kebijakan pemerintah untuk dapat terus menyesuaikan diri dengan kecenderungan global yang semakin kompleks khususnya masalah pembiayaan belanja negara.

Untuk membiayai belanja negara yang semakin lama bertambah besar, maka diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin lama semakin relatif sulit untuk diharapkan. Hal itu berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan atau penerimaan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Penerimaan bukan pajak antara lain penerimaan dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (Migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain. Dengan ketidakstabilan dan ketergantungan penerimaan-penerimaan

tersebut terhadap faktor eksternal, maka salah satunya andalan dewasa ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rahmat Soemitro 2002:1). Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara khususnya di dalam pembiayaan pembangunan, karena pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Keberadaan pajak sebagai sumber dana yang utama dalam pembangunan, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Dari berbagai macam jenis pajak tersebut diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000.

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 dan yang terakhir diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 pada bab penjelasan Pasal 10 ayat 1 bahwa Dirjen Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari wajib pajak. Semua penyetoran pajak negara harus disetorkan di kas negara atau tempat-tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, seperti yang selama ini telah ditetapkan yakni di kantor pos dan giro dan di beberapa bank pemerintah. Pada Pasal 10 ayat 2 juga dijelaskan tentang tata cara pembayaran pajak yang diharapkan dapat mempermudah penampungan administrasinya. Pasal 10 ayat 2 tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49 ayat 1 yang menghendaki agar bangunan milik negara harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib.

Sesuai dengan tugas dari Departemen Keuangan yaitu pencertiban segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, maka Departemen Keuangan menunjuk

Dirjend Perbendaharaan untuk menangani masalah penyetoran pajak dan penertiban administrasinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang bertugas untuk melayani urusan perbendaharaan dalam suatu wilayah. Untuk melakukan kegiatannya, KPPN Jember membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan handal sehingga akan menghasilkan suatu sistem dan prosedur yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

Untuk mengatur masalah masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai Undang-undang No 12 tahun 1994 dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai Undang-undang No 20 tahun 2000 ini juga diperlukan suatu prosedur akuntansi yang tepat dan benar karena di dalamnya berhubungan erat dengan masalah keuangan. Dalam menangani masalah ini, pemerintah dibantu oleh Departemen Keuangan, sedangkan yang melaksanakan sebagian tugas dari Departemen Keuangan, adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis beranggapan bahwa masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut layak untuk ditulis dalam bentuk laporan supaya bukan hanya kalangan tertentu saja yang mengetahuinya namun juga masyarakat luas khususnya mahasiswa sebagai sarana pembelajaran dan modal kehidupan ke depan. Maka sehubungan dengan hal tersebut maka dalam Praktek Kerja Nyata ini judul yang diambil penulis adalah : **"Prosedur Penatausahaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember"**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Penatausahaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember.
- b. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan keterampilan yang membentuk kemampuan, serta menumbuhkembangkan sikap profesional sebagai bekal memasuki lapangan kerja.
- c. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis/kerja tentang pelaksanaan Prosedur Penatausahaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember.
- b. Sebagai sarana latihan kerja sekaligus penerapan ilmu pengetahuan yang telah diterima di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember yang berlokasi di jalan Kalimantan nomor 35 Jember-Jawa Timur.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai 1 Maret sampai dengan 3 April 2005, dengan jangka waktu lebih 144 jam efektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan pada setiap hari kerja, dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Hari Senin - Kamis : Mulai pukul 07.30 - 17.00
Istirahat pukul 12.00 - 13.00
- b. Hari Jum'at : Mulai pukul 07.00 - 17.00
Istirahat pukul 11.00 - 13.30
- c. Hari Sabtu dan Minggu : Libur



Adapun jadwal kegiatan Praktek kerja Nyata adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Jadwal pelaksanaan

No	Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Pelaksanaan PKN sekaligus Pengenalan obyek PKN yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jember.	X	-	-	-
2.	Melaksanakan tugas yang diberikan sekaligus pengamatan prosedur kerja di seksi Perbendaharaan.	X	-	-	-
3.	Melaksanakan tugas dan pengumpulan data sekaligus pengamatan prosedur kerja di seksi Bendahara Umum	-	X	-	-
4.	Pengumpulan data dan Melaksanakan tugas yang diberikan sekaligus pengamatan prosedur kerja di seksi Verifikasi dan Akuntansi.	-	-	X	-
5.	Pengamatan prosedur kerja di seksi Sub Bagian Umum sekaligus melaksanakan tugas yang diberikan dan pengumpulan data.	-	-	-	X
7.	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing PKN.	-	X	X	X
8.	Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata	-	-	X	X

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut W. Gerald Cole yang diterjemahkan oleh Zaki Baridwan Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya suatu perilaku yang seragam tahun transaksi-transaksi perusahaan. (Zaki Baridwan, 1998:3)

Sedangkan menurut Mulyadi prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan secara berulang-ulang (Mulyardi, 2001:5)

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar:

1. Menulis.
2. Menggandakan.
3. Menghitung.
4. Membuat kode
5. Mendaftar.
6. Memilih (mensortasi).
7. Memindah.
8. Membandingkan.

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pencatatan data akuntansi (sebagian kegiatan *clerical*) adalah kegiatan untuk mencatat data akuntansi ke dalam jurnal dan rekening (buku yang ada di buku besar atau buku pembantu). Berikut ini adalah gambar dari unsur sistem akuntansi pokok:



Gambar 2.1 Unsur Sistem Akuntansi Pokok.

Sumber data : Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2004:15)

2.2 Pengertian Kegiatan Tata Usaha

2.2.1 Kegiatan Tata Usaha

Kegiatan usaha menurut George R. Terry yang dikutip oleh Warsidi (1996:1.23) yaitu berupa pekerjaan kantor, meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan menyediakan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan cepat dan menyampaikan beberapa fakta mendasar yang amat diperlukan untuk tindakan pengawasaa (terhadap bawahan atau pekerjaan) oleh pimpinan.

Tata usaha menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Warsidi (1996:2.8) adalah merupakan segenap rangkaian aktifitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja sama.

2.2.2 Ciri-ciri Kegiatan Tata Usaha

Menurut Warsidi (1996:1,25) kegiatan tata usaha mempunyai tiga macam ciri utama, yaitu:

a. Bersifat pelayanan

Artinya bahwa tata usaha melayani pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan tata usaha memudahkan dan meringankan beban tugas pimpinan dan atau membantu tugas-tugas pokok supaya lancar jalannya.

b. Bersifat menyebar luas ke seluruh bagian organisasi

Artinya bahwa kegiatan tata usaha diperlukan dan berlangsung diseluruh bagian organisasi, bahkan dapat pula terjadi di luar organisasi.

c. Dilaksanakan oleh semua orang dalam setiap organisasi

Artinya kegiatan tata usaha dilaksanakan oleh orang-orang sebagai pimpinan ataupun sebagai bawahan, semua melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2.5 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2.5.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. DR. Rochmat Soenarto SH (2007:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Gi. Kartasapoetra yang dimaksud pajak adalah suatu iuran rakyat/penduduk kepada kas negara atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang.

Dari definisi di atas unsur-unsur pajak meliputi:

1. iuran dari rakyat kepada kas negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa timbal jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari dua macam fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (penerima)

Yaitu pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membayar pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Reguler (mengatur)

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, permasalahan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.3.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 menyebutkan bahwa "Setiap

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)."

Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal atau tempat kedudukan harus melapor atau memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak untuk ditetapkan pada daerah mana wajib pajak harus mendaftarkan dirinya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang diperlukan oleh setiap wajib pajak. Dengan identitas ini wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang dipersyaratkan memiliki identitas perpajakan.

2.3.5 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Pasal 3 ayat 1 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak."

Dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment ke sistem self assessment, pada prinsipnya Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk:

- a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- b. Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu;

- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

2.3.6 Keberatan dan Banding

Wajib pajak yang merasa keberatan terhadap penetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus, diberi hak untuk mengajukan keberatannya kepada Direktur Jendral Pajak dapat diajukan tidak saja terhadap surat penetapan, tetapi dapat juga terhadap pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Syarat-syarat dalam mengajukan surat keberatan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak terdaftar;
- c. Satu surat keberatan diajukan terhadap satu penetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak;
- d. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat penetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan (*force majeure*);
- e. Mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas.

2.3.7 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, wajib pajak dihadapkan kepada adanya tiga kemungkinan yang dapat terjadi atas besarnya pajak terutang yang telah dihitung. Pertama besarnya pajak terutang telah sama dengan yang dibayarkan melalui Surat Pemberitahuan, kedua besarnya pajak terutang lebih besar daripada yang dibayarkan, dan

yang ketiga besarnya pajak terutang lebih kecil daripada yang telah dibayarkan atau dengan kata lain wajib pajak telah membayar pajak secara lebih.

Untuk hal yang ketiga di atas, undang-undang memberikan hak kepada wajib pajak untuk dapat meminta kembali kelebihan atas besarnya pajak yang telah dibayarkan. Kelebihan pembayaran pajak (sering disebut dengan istilah restitusi) ini dapat terjadi karena perhitungan wajib pajak sendiri atau karena adanya pemeriksaan oleh aparat pajak atau fiskus.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalamnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman yang masih termasuk perairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk keperluan tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, rumah toko, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll

Termasuk dalam pengertian bangunan yaitu:

- a. Jalan atau dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal;
- g. Dermaga;

- h. Aman mewah;
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Azas-azas dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
- b. Adanya kepastian hukum;
- c. Mudah dimengerti dan adil;
- d. Menghindari pajak berganda.

← 2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Baik bumi atau bangunan yang telah ditentukan klasifikasinya oleh Menteri Keuangan atas wewenang undang-undang.

Yang dimaksud Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terulang.

Didalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Faktor Letak;
- b. Faktor Peruntukan;
- c. Faktor Manfaat;
- d. Faktor Kondisi lingkungan.

Sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Faktor Bahan yang digunakan;
- b. Faktor Rekayasa;
- c. Faktor Letak;
- d. Faktor Kondisi lingkungan.

Dalam pasal 3 ayat 1 telah disebutkan bumi dan bangunan yang tidak dikenakan sebagai objek pajak yaitu bumi dan bangunan yang nyata-

nyata untuk kepentingan umum dan yang dimaksud tidak untuk memperoleh keuntungan, dibebaskan dari pajak.

2.4.3 Subjek Pajak.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum tentu merupakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Subjek PBB baru merupakan wajib PBB kalau telah memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Mempunyai objek yang dikenakan pajak berarti mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas objek pajak.

Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Subjek pajak dianggap sebagai wajib pajak bila dikenakan kewajiban membayar pajak karena menjadi wajib pajak atau subjek pajak.

Subjek pajak orang adalah perseorangan yang mempunyai hak atas bumi baik memiliki, menguasai, maupun memantaaatkan bumi dan atau bangunan. Dan subjek pajak badan adalah PT, CV, Fa, BUMN atau BUMD, Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan Bentuk Usaha tetap (BUT)

2.4.4 Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1985 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan:

- a. Bahwa 10 % dari hasil penerimaan PBB adalah bagian penerimaan bagi pemerintah pusat dan harus disetor sepenuhnya ke kas negara.
- b. Sedangkan yang 90 % dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah daerah. Setelah dikurangi dengan biaya

untuk pemungutan sebesar 10 % dan 90 % tersebut kemudian dibagi lagi untuk pemerintah daerah tingkat I dan Pemerintah daerah tingkat II dengan imbangan sebagai berikut: pemerintah daerah tingkat I = 20 % dan pemerintah daerah tingkat II = 80 %.

Berdasarkan pembagian tersebut maka masing-masing bagian dari pembagian penerimaan PBB adalah:

Pemerintah Pusat		= 10 %
Biaya pemungutan	10 % X 90 %	= 9 %
Pemerintah Daerah Tingkat I	20 % X 81 %	= 16,2 %
Pemerintah Daerah Tingkat II	80 % X 81 %	= 64,8 %
Jumlah penerimaan PBB		= 100 %

Mulai tahun 1994/1995 hasil penerimaan PBB bagi pemerintah pusat sebesar 10 % dibagikan kepada seluruh daerah tingkat II di Seluruh Indonesia. Hasil penerimaan PBB yang diterima oleh daerah merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2.4.5 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran PBB pada prinsipnya adalah hak wajib pajak yang dikembalikan oleh pemerintah dan diterima oleh wajib pajak. Kelebihan pembayaran tersebut dapat:

- Dikembalikan (restitusi) yaitu kelebihan pembayaran PBB yang dikembalikan pada wajib pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan.
- Kompensasi yaitu kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan hutang PBB lainnya yang sudah atau belum jatuh tempo atau atas permintaan wajib pajak diperhitungkan dengan ketetapan PBB tahun yang akan datang.
- Disumbangkan pada negara yaitu kelebihan pembayaran PBB yang atas permintaan wajib pajak disumbangkan pada negara.

Untuk memperoleh pengembalian tersebut wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Direktorat Jendral Pajak.

2.5 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

2.5.1 Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Arti dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.

Sedangkan arti dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh wajib pajak, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi:

- a. Pemindahan hak karena
 1. Jual beli;
 2. Tukar-menukar;
 3. Hibah;
 4. Hibah wasiat;
 5. Waris;
 6. Pemasukan dalam perseroan
 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. Penunjukan pembeli dalam lelang
 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Penggabungan usaha;
 11. Peleburan usaha;
 12. Pemekaran usaha;
 13. Hadiah;

b. Pemberian hak baru karena:

1. Kelanjutan pelepasan hak;
2. Di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

2.5.3 Perhitungan dan pembagian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Perhitungan pembagian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 519/KMK.04/2000 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Bab III pasal 6 ayat 3 tentang Pembagian Penerimaan BPHTB untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perhitungan pembagian penerimaan BPHTB adalah sebagai berikut:

20 % X Jumlah Penerimaan BPHTB – Untuk Pusat

80 % X Jumlah Penerimaan BPHTB – Untuk Pemda

sedangkan hasil pembagian untuk Pemerintah Daerah masih dibagi lagi, perhitungannya adalah sebagai berikut:

20 % X Hasil Pembagian Pemda – Untuk Propinsi.

80 % X Hasil Pembagian Pemda – Untuk Kabupaten.

BAB III
GAMBARAN UMUM
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER

3.1 Latar Belakang Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 025/76-25/1973 tahun 1973, didirikanlah Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN) Jember yang bertujuan untuk melayani urusan perbendaharaan dalam wilayah Jember. KPBN Jember beroperasi sampai dengan tahun 1979. Selanjutnya pada bulan Maret 1979, KPBN berubah nama menjadi Kantor Kas Negara (KKN), dan didirikan Kantor Perbendaharaan Negara (KBN) di Bondowoso.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 Nomor 645/KMK.01/1989, terjadi reorganisasi penggabungan KPN dan KKN menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jember dan keputusan ini mulai berlaku sejak bulan April 1990.

Pada bulan Juni 2004 berdasarkan adanya reformasi dalam tugas, fungsi dan struktur organisasi pada Departemen Keuangan, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/01/2004 tanggal 23 Juni 2004, KPKN Jember berubah fungsi dan strukturnya menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember.

Tujuan diadakannya reformasi dalam tubuh Departemen Keuangan adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).



3.2 Tugas dan Fungsi KPPN Jember

3.2.1 Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember

Tugas-tugas dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan kuasa bendahara umum.
2. Menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran.
3. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN.
2. Pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri keuangan (Bendahara Umum Negara).
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah diselurkan.
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara.
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang.
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri.
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBF).
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi dan akuntansi keuangan negara.
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
12. Pelaksanaan kehumasan.
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

3.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan beban dan luasnya tugas dan wewenang, maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diklasifikasikan dalam beberapa tipe yaitu :

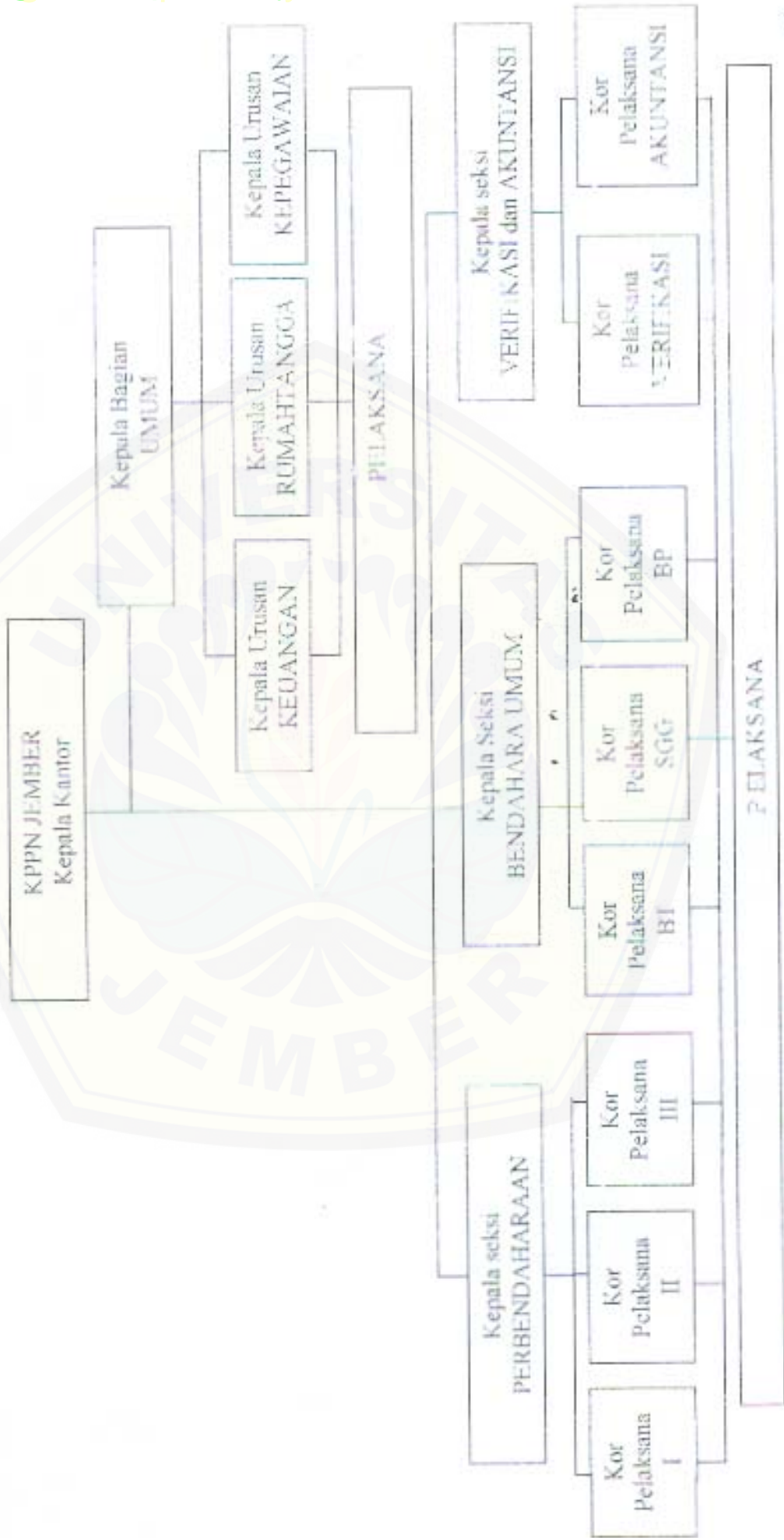
1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A Khusus
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe B.

Sedangkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember termasuk dalam tipe B, yang memiliki wewenang meliputi daerah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember terdiri dari:

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Keuangan
 - b) Koordinator Pelaksana Pelaporan dan Rumah Tangga
 - c) Koordinator Pelaksana Pelaporan Kepegawaian
4. Seksi Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a) Koordinator Pelaksana A
 - b) Koordinator Pelaksana B
 - c) Koordinator Pelaksana C
5. Seksi Bendahara Umum, terdiri dari:
 - a) Koordinator Pelaksana Bank Tunggal
 - b) Koordinator Pelaksana Bank / Giro Pos
 - c) Koordinator Pelaksana Bank Persepsi
6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi, terdiri dari:
 - a) Koordinator Pelaksana Verifikasi
 - b) Koordinator Pelaksana Akuntansi

Adapun bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER



Gambar 3.1 Struktur organisasi KPPN

Sumber Data : Keputusan Menteri Keuangan No 303/KMK/01/2004 Tgl 23 Juni 2004

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, masing-masing bagian dalam susunan organisasi KPPN Jember mempunyai tugas dan fungsi yang terperinci sebagai berikut:

A. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas dan fungsi memantau seluruh pekerjaan bawahannya, mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan para stafnya serta bertanggungjawab atas kelancaran tugas dan fungsi KPPN dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

B. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Keuangan
 - a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan urusan keuangan.
 - b. Menatausahakan dokumen anggaran
 - c. Menatausahakan persuratan dan kearsipan.
 - d. Melakukan penghapusan arsip sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan KPPN sebagai satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - f. Menatausahakan SPM dari Mitra Kerja KPPN.
2. Koordinator Pelaksana Pelaporan dan Rumah Tangga:
 - a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Sub Bagian Umum.
 - c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - d. Menyusun laporan keuangan tingkat Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
 - e. Melaksanakan urusan kehumasan
 - f. Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional
 - g. Melaksanakan proses penyelesaian (mencetak) SP2D.

3. Koordinator Pelaksana Pelaporan Kepegawaian:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
 - b. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.

C. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan terdiri dari tiga Koordinator Pelaksana antara lain Koordinator Pelaksana Perbendaharaan A, B, dan C yang masing-masing mempunyai fungsi melaksanakan urusan pengujian SPM, menerbitkan SP2D, dan urusan dokumentasi yang menjadi dasar penerbitan SP2D.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Melakukan pengujian terhadap dokumen SPM yang diterbitkan pengguna anggaran.
 - a. Melakukan pengujian terhadap SPM belanja Pegawai;
 - b. Pengujian terhadap SPM non belanja pegawai;
 - c. Melakukan pengesahan SPM-PHP-PBB/BPHTB.
2. Menerbitkan SP2D sebagai pengeluaran anggaran negara atas beban APBN.
3. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) karena adanya pegawai pindah / pensiun / meninggal dunia.
4. Menatausahakan dokumen pembayaran.
5. Menyusun laporan realisasi pembayaran.
6. Penatausahaan dan penyusunan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak.
 - a. Melakukan penatausahaan PNEP;
 - b. Menerbitkan Surat Penagihan (SPn), Surat Peindahan penagihan Piutang Negara (SP3N) dan Surat Keterangan Tanda Lunas pada negara (SKTL).

D. Seksi Bendahara Umum

Seksi Bendahara umum terdiri dari: Koordinator Pelaksana Bank Tunggal, Koordinator Pelaksana Bank / Giro Pos, dan Koordinator Pelaksana Bank Persepsi, yang masing-masing mempunyai fungsi:

1. Koordinator Pelaksana Bank Tunggal / Giro Pos

Fungsi dari Koordinator Pelaksana Bank Tunggal / Giro Pos yaitu melaksanakan urusan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Bank Tunggal dan Bank Operasional serta menyusun pertanggungjawabannya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Koordinator Pelaksana Bank Tunggal / Giro Pos mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Bank Operasional (BO)
- b. Melaksanakan urusan lalu lintas uang (penerimaan dan pengeluaran) melalui dan dari Kas Negara.
- c. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran negara melalui Bank Tunggal serta pembuatan daftar selisih saldo Bank Tunggal / Giro Pos.

2. Koordinator Pelaksana Bank Persepsi

Fungsi dari Koordinator Pelaksana Bank Persepsi yaitu melaksanakan urusan tugas melakukan urusan lalu lintas uang, pembukuan, dan pertanggungjawaban melalui Bank Persepsi serta pembuatan daftar selisih saldo Bank Persepsi. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Koordinator Pelaksana Bank Persepsi mempunyai tugas:

- a. Membuka rekening kas negara pada Bank Persepsi yang ditunjuk.
- b. Menerima Arsip Data Komputer (ADK), LHP (Laporan Harian Penerimaan), Nota Kredit (NK), Daftar Nominatif Penerimaan (DNP), serta SSP/SSBP/SSBC dan membukukannya pada Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP) dan Buku Bank yang bersangkutan sebagai penerimaan negara.

- e. Menerima Nota Debet (ND) pelimpahan saldo ke rekening Kas Negara pada Bank Indonesia dan membutukannya dalam Buku Bank Persepsi sebagai pengeluaran negara.
- d. Meneliti Laporan Harian Penerimaan (LHP) dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) sebagai daftar pengantar transaksi bank untuk dicocokkan dengan SSP/SSBP/SSBC.

Bank-Bank Persepsi yang ada dalam wilayah kerja KPPN Jember yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan negara serta melaporkannya pada Seksi Bendahara Umum ada tiga belas bank, yaitu:

Tabel 3.1
Daftar Bank Persepsi dan BO III Wilayah Kerja KPPN Jember

No	Nama Bank Persepsi	Wilayah kerja	Kedudukan
1.	BRI Jember	Jember	BO III
2.	BNI 1916 Jember	Jember	Bank Persepsi
3.	BTN Jember	Jember	Bank Persepsi
4.	Bank Mandiri Jember	Jember	Bank Persepsi
5.	Bank Bukopin Jember	Jember	Bank Persepsi
6.	Bank Permata Jember	Jember	Bank Persepsi
7.	BCA Jember	Jember	Bank Persepsi
8.	Bank Buana Jember	Jember	Bank Persepsi
9.	Bank Niaga Jember	Jember	Bank Persepsi
10.	BII Jember	Jember	Bank Persepsi
11.	Bank Danamon Jember	Jember	Bank Persepsi
12.	Bank Jatim Jember	Jember	Bank Persepsi
14.	Bank Jatim Lumajang	Lumajang	BO III
13.	BRI Lumajang	Lumajang	Bank Persepsi

Sumber Data: KPPN Jember, 2006

E. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Seksi Verifikasi dan Akuntansi ini baru terbentuk atau boleh dikatakan baru sehingga pelaksanaan prosedur dan kinerjanya masih belum sempurna. Adapun tugas-tugas pokok dari seksi verifikasi dan akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Pelaksana Verifikasi:
 - a. Menerima dan menatausahakan dokumen sumber.
 - b. Menerima dan menatausahakan laporan realisasi anggaran.
 - c. Melaksanakan verifikasi terhadap transaksi keuangan.
 - d. Melakukan tindak lanjut temuan kesalahan dokumen.
 - e. Rekonsiliasi laporan keuangan Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan laporan yang dihasilkan oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bendahara Umum.
 - f. Menerbitkan surat keterangan telah dibukukan.
2. Koordinator Pelaksana Akuntansi:
 - a. Membuat laporan keuangan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) berupa laporan arus kas dan neraca beserta arsip data komputer (ADK) untuk dikirim ke Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan.
 - b. Membuat laporan keuangan Sistem Akuntansi Umum (SAU) berupa laporan realisasi anggaran dan neraca untuk dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
 - c. Melaksanakan pengolahan data dari satuan kerja dan melaksanakan rekonsiliasi.
 - d. Melakukan perekaman saldo uang persediaan sisa tahun anggaran yang lalu.
 - e. Melakukan proses posting dan pengecekan buku besar.
 - f. Membuat dan mengirimkan laporan keuangan.

3.5 Kegiatan Usaha

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember adalah instansi pemerintah yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa, yaitu berupa pelayanan terhadap Bendaharawan Satuan Kerja/pihak ketiga yang masih dalam wilayah kerjanya dalam mengajukan pembayaran. Adapun wilayah yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember adalah meliputi wilayah Jember dan Lumajang.

Secara struktural Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berada di bawah naungan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas pokok di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember adalah:

1. Melayani penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun non-pajak.

Setiap hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember mendata jumlah penerimaan negara melalui Bank-Bank yang telah ditunjuk langsung oleh Pemerintah (Bank Penerima).

2. Mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

KPPN Jember akan menerbitkan Mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Bendaharawan/Mitra Kerja KPPN Jember. Sebagai contoh, Universitas Jember (UNEJ) mengajukan SPM untuk belanja gaji pegawai kantor dan untuk belanja gaji dosen dan untuk belanja barang.

3. Melakukan penghitungan gaji untuk seluruh PNS, TNI, dan POLRI yang berada di Wilayah Jember dan Lumajang.
4. Menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan karena ada beberapa alasan, antara lain:

- a. Ada seorang PNS, TNI, atau POLRI yang pindah ke daerah lain.

- b. Ada seseorang PNS, TNI, atau POLRI yang pensiun atau meninggal dunia.

Tujuan diterbitkannya SKPP adalah untuk menghindari agar pembayaran gaji tidak double.

Adapun instansi / Satuan kerja / departemen yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember, antara lain:

1. Departemen Agama
2. Departemen Keuangan
3. Departemen Kehakiman
4. Departemen Pertahanan dan Keamanan
5. Universitas Jember
6. Kejaksaan Negeri
7. TNI
8. POLRI
9. Badan Pusat Statistik
10. Badan Pertanahan Nasional
11. Radio Republik Indonesia
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
13. Pemda Kabupaten Lumajang

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai prosedur penatausahaan setoran dan pembagian PBB dan BPHTB pada KPPN, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sesuai Undang-Undang No. 16 tahun 2000 pasal 10 ayat 2 bahwa setoran PBB dan BPHTB harus dilaporkan ke KPPN untuk diadministrasikan dan dibukukan dengan benar.
2. Dengan setoran PBB dan BPHTB yang dilaporkan ke KPPN maka dapat diketahui kecocokan laporan dari Bank Operasional III (BO III) dan Bank Persepsi dengan KPPN.
3. Berdasarkan prosedur yang berlaku maka dapat diteliti kebenaran dan kecocokan antara Nota Debet dan Nota Kredit.
4. KPPN sebagai kontrol atau pengawasan Bank Operasional III (BO III) apakah telah melakukan pembagian PBB setiap hari Jumat dan pembagian BPHTB setiap hari Rabu.
5. Dengan input data secara komputerisasi maka proses laporan penerimaan dan pembagian PBB dan BPHTB dapat dikirim secara cepat ke bagian verifikasi dan akuntansi sehingga dapat dibukukan dan dikirim ke Kanwil Dirjend Perbendaharaan sesuai dengan jadwal.
6. Dengan adanya seksi verifikasi dan akuntansi, maka dokumen-dokumen penerimaan dan pembagian PBB dan BPHTB dapat diverifikasi kebenarannya terlebih dahulu sebelum diposting ke komputer oleh pelaksana akuntansi, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi selisih saldo pada pembukuannya.
7. Prosedur penatausahaan setoran PBB dan BPHTB di KPPN Jember dimulai dari penerimaan Nota Debet, Nota Kredit dan SPM dari Bank persepsi dan diterima oleh Sub Bagian Umum, kemudian diserahkan ke kepala kantor untuk diperiksa setelah itu dilanjutkan ke kepala seksi bendahara umum dan diteruskan ke pelaksana PBB dan BPHTB untuk

dibuat perincian SP2D dan dibukukan serta dihitung kebenaran pembagiannya. Dari pelaksana diserahkan ke operator komputer untuk diinput data-datanya dan dibukukan pada buku bank, buku pembantu pengeluaran dan buku pembantu penerimaan untuk ditandatangani oleh kepala seksi bendahara umum dan dikirim ke seksi verifikasi dan akuntansi.

8. Selama pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis memperoleh pengalaman mempelajari prosedur penatausahaan setoran dan pembagian PBB dan BPHTB dan juga berbagai prosedur kerja dan berbagai aktivitas di KPPN Jember antara lain:
 - a. Mengartukan gaji Pegawai Negeri, TNI dan POLRI berdasarkan data dari masing-masing instansi;
 - b. Mengamati dan mempelajari proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk gaji Pegawai Negeri, TNI dan POLRI sampai penyusunan konsep surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Mempelajari prosedur pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Menerima dan mencatat penerimaan setoran pajak dari Bank Persepsi dan giro pos setiap hari;
 - e. Mencocokkan draft NPWP dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dikirim Bank Persepsi dan giro pos;
 - f. Membantu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen-dokumen sumber yang diterima dari Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bendahara Umum;
 - g. Menerima dan mengagendakan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. Membantu menerima, menyortir, mencatat atau meregistrasikan serta meneruskan surat masuk dan dokumen lainnya kepada seksi lain di KPPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan Zaki. 1998. *Sistem Akuntansi Penyusun Prosedur Dan Metode (Edisi 5)*. BPFE. Yogyakarta.
- Kartosapoetro G. 1989. *Pajak Bumi Dan Bangunan dan Prosedur Pelaksanaannya*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Penerbit Andi Yogyakarta. Yogyakarta
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- RI-Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Tahun 1983. Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Citra Umbaran, Bandung.
- RI-Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999. Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- RI-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- RI-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*. Jakarta.
- RI-DEPKEU. 2005. *Prosedur dan Tata Kerja KPPN*. Penerbit DepKeu RI Dirjend Perbendaharaan. Jakarta.
- RI-KEPPRES (Peraturan Pemerintah) Nomor 47 Tahun 1985. Tentang *Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. (Lampiran SK. Menteri keuangan RI) No: Kep-32 / WPJ. 12 / KB.06/ 2005 Tentang *Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan BPHTP*. Jakarta. [Http://www.PusPenPa.Depkeu.Co.Id](http://www.PusPenPa.Depkeu.Co.Id). [8 April 2006]
- RI-Sekjend Perbendaharaan RI. 2006. *Ilmu Hukum Pajak Republik Indonesia*. [serial on line] [Http://www.Kanwilpajakhusus.Depkeu.Go.Id/Peraturan.Asp](http://www.Kanwilpajakhusus.Depkeu.Go.Id/Peraturan.Asp) [2 April 2006]
- Soemitro Rochmat. 1989. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. PT. Eresco. Bandung.
- Warsidi, 1996. *Administrasi Perkantoran*. Penerbit Komunika. Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Tegalhoto) No. 17 Kotak Pos 125 - ☎ Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337900
 Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jitim

nomor : 0237 /J25.1.4/P/6/06

Jember,

inspirasi :
 perihal : **Kesediaan Menjadi Tempat PKN
 Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ**

kepada : **Kantor Pelayanan**

Yth. **Perbendaharaan Negara (KPPN)**

di- **Jember**

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami berharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1	Amas Firmasayah	02 4366	D III Akuntansi
2	Bambang Agung Nugroho	02 -- 4367	D III Akuntansi

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :
Mei 2005

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Dekan
 Pembantu Dekan I,
 Dr. H. Mok. Salwa S.Sc
 NIP. 191 417 212



Nomor : S-105
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Kesediaan menerima mahasiswa yang
Mahasiswa Gab. Ekonomi UNED

6 Februari 2006

Yth
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jl. Jawa No. 17
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 0237/J25.I.4/P 6/2006 tanggal - hal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan menerima 2 (dua) orang mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada instansi kami selama 1 bulan terhitung mulai bulan Maret 2006, dengan catatan selama menjalani Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut agar mematuhi semua peraturan yang ditetapkan kantor.

Demikian agar maklum.

Handwritten signature

Kepala Kantor
Handwritten signature
SUTOMO
NIP. 060043534



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH XV
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
JEMBER**

Jl. Kalimantan No. 36
Jember (60121)

Telepon : (0331) 334144
Facs : (0331) 336571

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

No	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Kedisiplinan	80	Sangat Baik
2	Ketertiban	80	Sangat Baik
3	Prestasi Kerja	75	Baik
4	Kesopanan	80	Sangat Baik
5	Tanggung Jawab	80	Sangat Baik

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ANAS FIRMANSYAH
NIM : 020803104386
Program Studi : D III Akuntansi

Identitas Pemberi nilai :

Nama : Ujang Munir, S.Sos
NIP : 060071346
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Instansi : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember

Jember, 29 Maret 2006

Kepala Sub Bagian Umum

Ujang Munir, S.Sos
NIP. 060071346



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KANTOR WILAYAH XII
KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA JEMBER

Jl. Kalimantan No.36
Jember (59121)

Telp: (0331)33414
Faks: (0331)336071

NAMA : Anas Firmansyah
ASAL : DIII Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Jember

TANGGAL	MASUK KANTOR		RETIRAHAT				PULANG KANTOR		KETERANGAN
	JAM	PARAF	PULANG		MASUK		JAM	PARAF	
01 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
02 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
03 MAR 06	07.00	Yes	11.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
04 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
05 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
06 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
07 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
08 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
09 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
10 MAR 06	07.00	Yes	11.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
11 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
12 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
13 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
14 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
15 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
16 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
17 MAR 06	07.00	Yes	11.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
18 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
19 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
20 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
21 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
22 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
23 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
24 MAR 06	07.00	Yes	11.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
25 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
26 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
27 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
28 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
29 MAR 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	
30 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
31 MAR 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
01 APRIL 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
02 APRIL 06	-	-	-	-	-	-	-	-	LIBUR
03 APRIL 06	07.30	Yes	12.00	Yes	13.30	Yes	16.00	Yes	

Jember,
A. Anas, Kepala Kantor



Jl. Kalimantan No.36
Jember (59121)

NAMA
ASAL

Jember,
A. Anas, Kepala Kantor

Jember, 27 April 2006



BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening
0021-01-000079.30.0
KEPADA → KPPN PBB
Nomor Buku Besar
B.242 -HX/KC/DEL/2006

NOTA DEBET

URAIAN	JUMLAH
TELAH KAMI DEBET KE REKENING SAUDARA ATAS PEMBAGIAN PBB UNTUK KEUNTUNGAN KASDA DATI II JATIM PERIODE 21-01-2006 sd 27-01-2006 64.8 Rp 4.244.865.00	Rp 4.244.865.00
JUMLAH	
Rp 4.244.865.00	

(empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)

Jumlah tersebut diatas telah dibebankan dalam rekening saudara

20

JEMBER, 27-01-2006

LEMBARAN UNTUK NASABAH

BANK RAKYAT INDONESIA
Widjanarko
A.M.O.



BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening
0021-01-000079.30.0
KEPADA → KPPN PBB
Nomor Buku Besar
B.242 -HX/KC/DEL/2006

NOTA DEBET

URAIAN	JUMLAH
TELAH KAMI DEBET KE REKENING SAUDARA ATAS PEMBAGIAN PBB UNTUK KEUNTUNGAN KASDA DATI I JATIM PERIODE 21-01-2006 sd 27-01-2006 16.2 Rp 1.061.216.00	Rp 1.061.216.00
JUMLAH	
Rp 1.061.216.00	

(satu juta enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah)

Jumlah tersebut diatas telah dibebankan dalam rekening saudara

20

JEMBER, 27-01-2006

LEMBARAN UNTUK NASABAH

BANK RAKYAT INDONESIA
Widjanarko



BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening
 0021.01.000070.00.0
 KEPADA → KPPN PBB

Nomor Buku Besar
 B.242-IX/KC/PEL/2006

NOTA DEBET

URAIAN	JUMLAH
TELAH KAMI DEBIT KE REKENING SAUDARA ATAS PEMBAGIAN PBB UNTUK KEUNTUNGAN KPPN JEMBER PERIODE 21-01-2006 sd 27-01-2006 10 % RP 6.550.719	Rp 655.074.00
JUMLAH	Rp 655.074.00

(enam ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah)

Jumlah Tersurat Diatas Telah Dibebaskan Dalam Rekening Saudara

20

LEMBARAN UNTUK NASABAH

JEMBER 21-01-2006
BANK RAKYAT INDONESIA
 Widjairatno
 A.M



BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening
 0021.05580070.00.0
 KEPADA → KPPN PBB

Nomor Buku Besar
 B.242-IX/KC/PEL/2006

NOTA DEBET

URAIAN	JUMLAH
TELAH KAMI DEBIT KE REKENING SAUDARA ATAS PEMBAGIAN PBB UNTUK KEUNTUNGAN KPPN JEMBER PERIODE 21-01-2006 sd 27-01-2006 9 % RP 6.550.719	Rp 689.564.00
JUMLAH	Rp 689.564.00

(lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)

Jumlah Tersurat Diatas Telah Dibebaskan Dalam Rekening Saudara

20

LEMBARAN UNTUK NASABAH

JEMBER 21-01-2006
BANK RAKYAT INDONESIA
 Widjairatno
 A.M

Lembaran ke-1

BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening	
0021.01.000078.30.0	KEPADA →
0021.01.000078.30.0	KPPN BPHTB
Nomor Buku Besar	

NOTA DEBIT

URAIAN	JUMLAH
A. KAMU DEBIT KEREKENING SODARA ATAS BAGIAN BPHTB UNTUK KEUNTUNGAN KASDA I II JEMBER PERIODE 14-21/03/06 Rp. 102.753.824,-	102.753.824,00
JUMLAH	102.753.824,00

Jumlah tersebut diatas telah didibokan dalam rekening saudara

LEMBARAN UNTUK NASABAH

Hormat Kami
BANK RAKYAT INDONESIA
Widjanto
AND

UM-04

Lembaran ke-1

BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening	
0021.01.000078.30.0	KEPADA →
0021.01.000078.30.0	KPPN BPHTB
Nomor Buku Besar	

NOTA DEBIT

URAIAN	JUMLAH
A. KAMU DEBIT KEREKENING SODARA ATAS BAGIAN BPHTB UNTUK KEUNTUNGAN KASDA I II JEMBER PERIODE 14-21/03/06 Rp. 25.688.456,-	25.688.456,00
JUMLAH	25.688.456,00

Jumlah tersebut diatas telah didibokan dalam rekening saudara

Hormat Kami



BANK JATIM

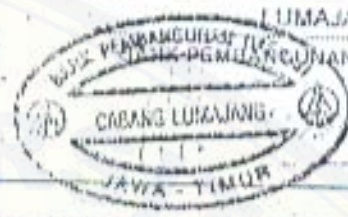
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Kepada : **KPKN QQ, PBB B.O. V**
Di : **JEMBER**

Total kami
 Debit Rek. No. :
 Kredit Rek. No. :
Nota No. 9247.09.2005
0091000506 - GIRO PMRTH
0030000440 - KU YADIB CAB JE

KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
PENDEBITAN KE REK GIRO SDR. ATAS PEMBACIAN PBB UNTUK KEUNTUNGAN KPKN JEMBER PERIODE : 27 DES. 2005 S/D 28 DES. 2005 SEBESAR 10% x Rp 2.096.319.528 00	Rp 209.631.954.00	
JUMLAH	Rp 209.631.954.00	

Tanggal Valuta : 28.12.2005
Terbilang : DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH
LUMAJANG, 28 DESEMBER 2005
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
CABANG LUMAJANG
JAWA - TIMUR



BANK JATIM

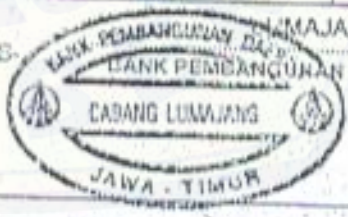
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Kepada : **KPKN QQ, PBB B.O. V**
Di : **JEMBER**

Total kami
 Debit Rek. No. :
 Kredit Rek. No. :
Nota No. 8249.09.2005
0091000506 - GIRO PMRTH
0030000440 - KU YADIB CAB JE

KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
PENDEBITAN KE REK GIRO SDR. ATAS PEMBAGIAN PBB UNTUK KEUNTUNGAN KPKN JEMBER PERIODE : 27 DES. 2005 S/D 28 DES. 2005 SEBESAR 9% x Rp 2.696.319.528 00	Rp 242.668.757.00	
JUMLAH	Rp 242.668.757.00	

Tanggal Valuta : 28.12.2005
Terbilang : DUA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH
LUMAJANG, 28 DESEMBER 2005
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
CABANG LUMAJANG
JAWA - TIMUR





BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening

KEPADA
0021 55 000793000

Nomor Buku Besar

KIPON PGB

MOTA KREDIT

U H A I A N

J U M L A H

SETORAN DR BRI

Rp 6.971,35

J U M L A H Rp 6.971,35

BILANG

(Nilai dan jumlah yang tertera di atas ini adalah benar-benar sesuai dengan yang tertera di atas)

Jumlah tersebut Diater Telah Dikreditkan Dalam Rekening Saudara.

19

Hormat kami,

BANK RAKYAT INDONESIA

TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	PARAF
		KREDIT	

W d j e s k o
A M

JEMBER



BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening
0221 KEPADA 0270300

Nomor Buku Besar
KPN 03170

NOTA KREDIT

URAIAN	JUMLAH
SET DARI MANDIRI	Rp 29.138.622.00
JUMLAH	Rp 29.138.622.00

RBI LANG

(dua puluh sembilan juta seribu tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh dua rupiah)
Jumlah Tersebut Telah Dikreditkan Dalam Rekening Saudara.

TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	PARAF
		KREDIT	

Hormat kami,
BANK RAKYAT INDONESIA
Widjandarmo
A.M.D.



BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening
0221 KEPADA 0270300

Nomor Buku Besar
KPN 03170

NOTA KREDIT

URAIAN	JUMLAH
SET DARI BRI	Rp 6.328.525.00
JUMLAH	Rp 6.328.525.00

RBI LANG

(lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
Jumlah Tersebut Telah Dikreditkan Dalam Rekening Saudara.

TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	PARAF
		KREDIT	

Hormat kami,
BANK RAKYAT INDONESIA
Widjandarmo
A.M.D.

BANK INDONESIA ADVIS DEBIT KREDIT + No. 040.359.30.2.49
 KEPADA YANG BERKEPENTINGAN REK. KAS NEGARA "A" JEMBER JEMBER, 28-12-2005
 Hari ini telah dibukukan ke dalam rekening Saudara, sejumlah : Val. Tgl. 28-12-2005

Terbilang DUARATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS RATUS ENAM PULUH TUJUH RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBUAN		Rp 242,668,757.00
DEBIT : 809.000040 PERHITUNGAN ANTAR KANTOR		KREDIT : 501.000000 REKENING KAS NEGARA "A" JEMBER
KETERANGAN PENERIMAAN PBB 9% (JASA PUNGUT)		Berhubung dengan 07/RC/JR/6178
Pengirim BPD JAWA TIMUR	Penerima	

Untuk KREDIT Saudara
 KEPALA SEKSI
 BANK INDONESIA
 BAMBANG E.

BANK INDONESIA ADVIS DEBIT KREDIT + No. 040.359.30.2.49
 KEPADA YANG BERKEPENTINGAN REK. KAS NEGARA "A" JEMBER JEMBER, 28-12-2005
 Hari ini telah dibukukan ke dalam rekening Saudara, sejumlah : Val. Tgl. 28-12-2005

Terbilang DUARATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT RIBUAN		Rp 269,631,954.00
DEBIT : 809.000040 PERHITUNGAN ANTAR KANTOR		KREDIT : 501.000000 REKENING KAS NEGARA "A" JEMBER
KETERANGAN PENERIMAAN PBB 10%		Berhubung dengan 07/RC/JR/6177
Pengirim BPD JAWA TIMUR	Penerima	

Untuk KREDIT Saudara
 KEPALA SEKSI
 BANK INDONESIA K.C.
 BAMBANG E.

BANK INDONESIA ADVIS DEBIT KREDIT + No. 040.359.30.2.3
 KEPADA YANG BERKEPENTINGAN REK. KAS NEGARA "A" JEMBER JEMBER, 22-03-2006
 Hari ini telah dibukukan ke dalam rekening Saudara, sejumlah : Val. Tgl. 22-03-2006

Terbilang SEMIBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU SEMIBILAN RATUS LIMA PULUH SATU RIBUAN		Rp 9,255,951.00
DEBIT : 809.000040 PERHITUNGAN ANTAR KANTOR		KREDIT : 501.000000 REKENING KAS NEGARA "A" JEMBER
KETERANGAN SELIMP BPHTB 20 % RP.46.279.748		Berhubung dengan 08/RC/JR/1432
Pengirim BRI (PERSERO) TBK.	Penerima	

Untuk KREDIT Saudara
 KEPALA SEKSI
 BANK INDONESIA
 BAMBANG E.

BANK INDONESIA ADVIS DEBIT KREDIT + No. 040.359.30.2.45
 KEPADA YANG BERKEPENTINGAN REK. KAS NEGARA "A" JEMBER
 Hari ini telah dibukukan ke dalam rekening Saudara, sejumlah

Val. Tgl. 28-12-2005

Terbilang DELAPAN PULUH JUTA SERATUS TUJUH BELAS RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH		Rp 80,117,829.00 Untuk KREDIT KEPALA SEKSI BANK INDONESIA
DEBIT : 809.000040 PERHITUNGAN ANTAR KANTOR	KREDIT : 501.000000 REKENING KAS NEGARA "A" JEMBER	
KETERANGAN PELIMPAHAN PAJAK BNI JBR PELIMP PJK BNI JEMBER 28 DESEMBER 2005 PT. BANK NEGARA INDONESIA. (P)		

BANK INDONESIA ADVIS DEBIT KREDIT + No. 040.359.30.2.45
 KEPADA YANG BERKEPENTINGAN REK. KAS NEGARA "A" JEMBER
 Hari ini telah dibukukan ke dalam rekening Saudara, sejumlah

Val. Tgl. 28-12-2005

Terbilang DELAPAN DUTA SERATUS ENAM PULUH RIBU TIGA RATUS ATUSEBAM PULUH DUA RUPIAH		Rp 8,160,362.00 Untuk KREDIT BANK INDONESIA SEKSI
DEBIT : 809.000040 PERHITUNGAN ANTAR KANTOR	KREDIT : 501.000000 REKENING KAS NEGARA "A" JEMBER	
KETERANGAN PELIMPAHAN PAJAK BUKOPIN CABANG JEMBER TANGGAL 28 DESEMBER 2005 PT. BANK BUKOPIN		

BANK INDONESIA ADVIS DEBIT KREDIT + No. 040.359.30.2.48
 KEPADA YANG BERKEPENTINGAN REK. KAS NEGARA "A" JEMBER
 Hari ini telah dibukukan ke dalam rekening Saudara, sejumlah

Val. Tgl. 28-12-2005

Terbilang SERATUS ENAM PULUH DUTA SERATUS EMPAT RIBU ENAM RIBU SEMBILANERATUS ENAM PULUH RUPIAH		Rp 160,146,960.00 Untuk KREDIT KEPALA SEKSI BANK INDONESIA
DEBIT : 809.000040 PERHITUNGAN ANTAR KANTOR	KREDIT : 501.000000 REKENING KAS NEGARA "A" JEMBER	
KETERANGAN PELIMPAHAN PAJAK TGL 28-12-2005 BPD JAWA TIMUR		

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

TRANSFER

Ditujukan Kepada / Send to :
 Nama / Name : **KPPN JEMBER**
 Alamat / Address :
 Bank Tujuan / Beneficiary Bank :
 No. Rekening / Rekening No. :
 Kota / City :
 Kode Bank / Bank's Code : **BANK INDONESIA CAB JEMBER**
 Melalui Kantor/KCP/DR Unit / Via Branch :
 Nama Pengirim / Sender :
 Alamat / Address : **KPPN**
 Sumber Dana / Source of Fund :
 Kebutuhan / Purpose :
 Pekerjaan / Occupation :
 Jabatan / Position :
 Tempat & Tgl Lahir / Place & Birth Date :
 No. KTP/SIM/Pasport :
Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengarahkan Nasabah
 * Khusus dan bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BNI
 ** Bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BNI dengan jumlah pengirimannya
 > Rp. 100 juta akan dikenakan biaya transfer standar

APLIKASI PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KURUNG
APPLICATION FOR TRANSFER IN/OUT COUNTRY

JEMBER, 25-03-2008

KLIRING

Pembayaran / Debit	Rupiah	Valas / USD
Jumlah dikawatir / Amount Rp	32.110.570,00	
Uang / Charges *** Rp	25.000,00	
Jumlah disetor / Total	32.135.570,00	

Tertimbang / Amount in Words :
 puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah
 Disetor secara / Deposit by :
 Tunai / Cash
 Lembaran / Cheque
 Debet Rek :
 Cek / BG : 0021.01.001274.99.1
 (dua seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
 Disetujui dan ditandatangani oleh kepala pengirim setelah disetujui dan disetujui oleh penerima dan ditandatangani
PELIMP BPHTB 20 % Rp.130.552.850
 Benda / Remarks :
 Approved Teller TT. Pengirim / Approving Signature

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

TRANSFER

Ditujukan Kepada / Send to :
 Nama / Name : **USSA-QATI II JEMBER**
 Alamat / Address :
 Bank Tujuan / Beneficiary Bank :
 No. Rekening / Rekening No. :
 Kota / City :
 Kode Bank / Bank's Code : **BANK JATIM CABANG JEMBER**
 Melalui Kantor/KCP/DR Unit / Via Branch :
 Nama Pengirim / Sender :
 Alamat / Address : **KPPN JEMBER**
 Sumber Dana / Source of Fund :
 Kebutuhan / Purpose :
 Pekerjaan / Occupation :
 Jabatan / Position :
 Tempat & Tgl Lahir / Place & Birth Date :
 No. KTP/SIM/Pasport :
Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengarahkan Nasabah
 * Khusus dan bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BNI
 ** Bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BNI dengan jumlah pengirimannya
 > Rp. 100 juta akan dikenakan biaya transfer standar

APLIKASI PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KURUNG
APPLICATION FOR TRANSFER IN/OUT COUNTRY

JEMBER, 25-03-2008

KLIRING

Pembayaran / Debit	Rupiah	Valas / USD
Jumlah dikawatir / Amount	102.758.624,00	
Uang / Charges *** Rp	25.000,00	
Jumlah disetor / Total	102.778.624,00	

Tertimbang / Amount in Words :
 seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah
 Disetor secara / Deposit by :
 Tunai / Cash
 Lembaran / Cheque
 Debet Rek :
 Cek / BG : 0021.01.000076.00.0
 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
 Disetujui dan ditandatangani oleh kepala pengirim setelah disetujui dan disetujui oleh penerima dan ditandatangani
PELIMP BPHTB 20 % Rp.130.552.850,-
 Benda / Remarks :
 Approved Teller TT. Pengirim / Approving Signature

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

TRANSFER KURIR RTGS

Surat Perintah Pembayaran
 Nama/No: RASADATI I JATIM
 Alamat/Address: BANK JATIM SABANG SURABAYA
 0011000477
 No. Rekening: 002101000078.30.0
 Kota/City: Negara/Country:
 Kode Bank/Bank Code ***:
 Misi/Kardus/KORPRI Unit/Asuransi:
 Nama Pengirim/Sender: KPN-JEMBER
 Alamat/Address:
 Sumber Dana/Source of Fund*:
 Kapri/Korpri/Pekerja*:
 Pekerjaan/Occupation*:
 Jabatan/Position*:
 Tanggal & Tgl. Lahir/Place & Date of Birth*:
 No. KTP/S.M./Pasport**:

ALAP PENGIRIMAN UANG DALAM RUANG NEGERIKLING
APPLICATION FOR TRANSFER
 JEMBER, 29-03-2008

Paricloran/buat	Rupiah	Valori/nilai
Jumlah dikirim/areg	25.638.456,00	
Bayar/bayar ***		
Jumlah dasar/bes	Rp 25.638.456,00	

Terdikang/Amount in Words:
 dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah

Debitor socia / Debit by:
 Tunai/Cash Lainnya/Other
 Debit Rekening 002101000078.30.0
 C/C/B/S

Dia buatkan 2 (dua) buku setoran mata uang dengan penandatanganan di muka bank dan 1 (satu) buku setoran yang sudah pengirim setoran di muka ke bank.

Depan/Respect:


Atas nama/For:
 KPN-JEMBER

*** Diambil dari
 Tunai/Depositor
 Lembar 1 dan 2 untuk bank
 Lembar 3 untuk nasabah

BANK RAKYAT INDONESIA

NOTA DEBIT

No. Rekening
 0021.01.000078.30.0
 KEPADA →
 KPN-JEMBER
 Nomor Buku Besar
 KPN-SPHTB

URAIAN	JUMLAH
TELAH KAMI DEBIT KEREKENING SODARA ATAS PEMBAGIAN BPHTB UNTUK KEUNTUNGAN KPPN JEMBER PERIODE 14-21/03/08 Rp X Rp.160.552.950,-	32.110.570,00
JUMLAH	32.110.570,00

Surat Perintah Pembayaran ini dibuat dengan dua rangkai. Satu rangkai diserahkan kepada penerima dan satu rangkai disimpan di Bank Rakyat Indonesia sebagai tanda bukti penerimaan.

Jumlah Terbilang Dalam Surat Perintah Pembayaran ini adalah dua puluh tujuh juta
 Jumlah Terbilang Dalam Surat Perintah Pembayaran ini adalah dua puluh tujuh juta

20

Hormat Kami
BANK RAKYAT INDONESIA
 Widjanatko
 A.M.U.

LEMBARAN UNTUK NASABAH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	SURAT PEMBUKUAN PENERIMAAN/PENGELUARAN KIRIMAN BANG.	NO. 22113/AM/2005
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------

Pada hari ini dibukukan penerimaan / pengeluaran *) kiriman uang masuk keperluan administrasi pembukuan Bendaharawan Umum KPPK sebesar Rp. 4.883.051.007,- dengan huruf (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah)

Jember, 30 Desember 2005

h.n. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kepala Seksi Bendahara Umum
Pemegang Rekening Kas Negara A



DJASWADI
NIP. 050049382

*) coret yang tidak perlu

Pada hari ini dibukukan pengeluaran kas lain yang untuk keperluan administrasi pembelian Bendahara Umum RTM

Selasar Rp 4.843.051,057
(Empat milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah)

Keterangan:

Pengeluaran:

SPM BLN (-) Rp -
Droving ke BO I (-) Rp -

Penerimaan:

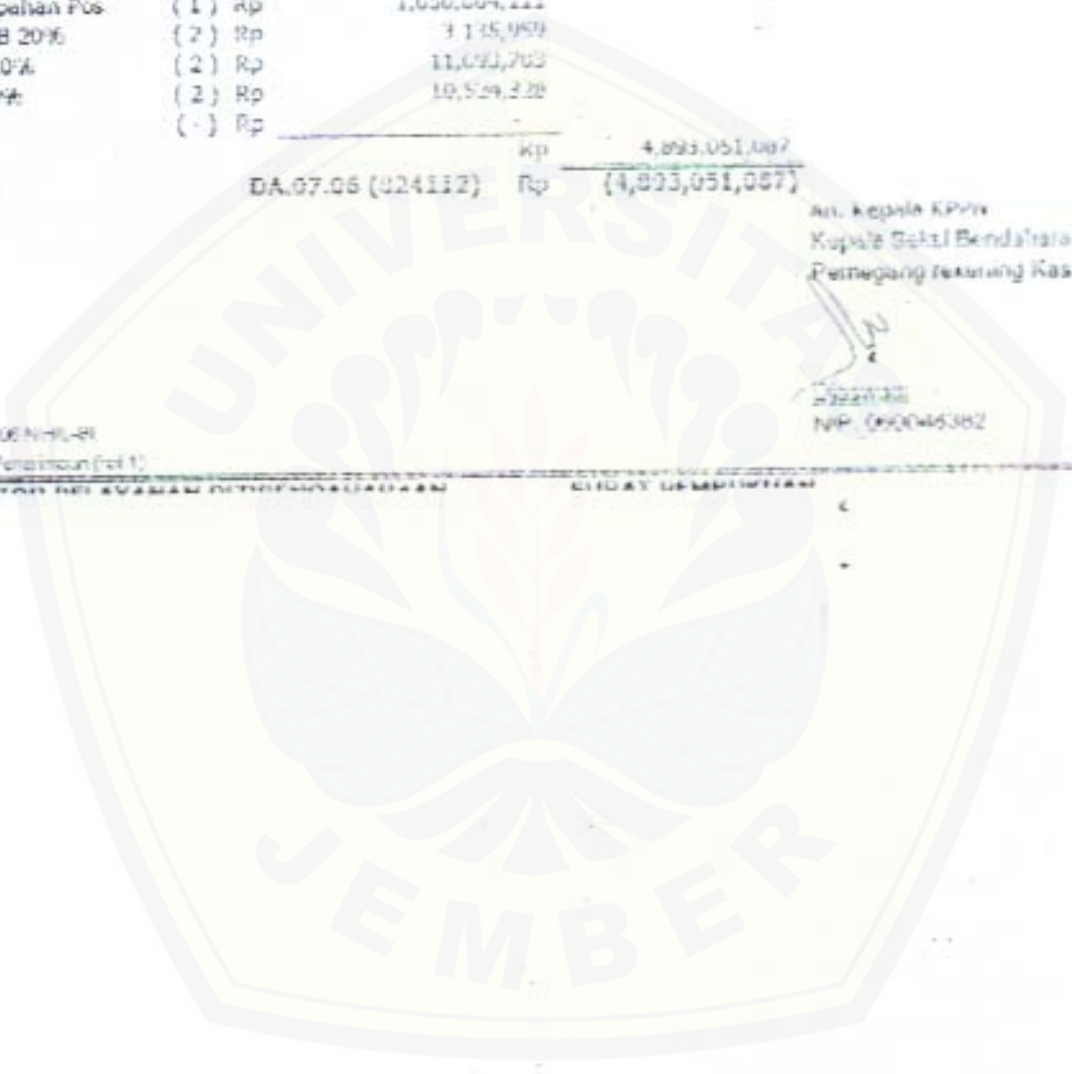
Pelimpahan Bank (/) Rp 3.026.032,966
Penarikan BO I (-) Rp -
Pelimpahan Pos (/) Rp 1.050.004,111
BPHTB 20% (/) Rp 3.135,959
PBB 10% (/) Rp 11.093,703
PBB 9% (/) Rp 10.524,328
SPB (-) Rp -

Rp 4.093.051,057
DA.07.06 (024112) Rp (4.843.051,057)

An. Kepala KPWA
Kantor Seksi Bendahara Umum
Penerimaan rekening Kas Negara A

2023/12/13
NIP. 060645382

DA.07.06/111-RI
Penerimaan (ref 1)



REKAPITULASI
BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN
REKAP BKPP : 41 PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tanggal : 30 Des 2005
Bulan : Desember 2005
Tahun Anggaran : 2005
Halaman : 1

BANK TUNGGAL

No. Urut	Kelompok MAP BKPP	H A R I I N I		S/D HARI YANG LALU		S/D H A R I I N I	
		Trans.	Rupiah	Trans.	Rupiah	Trans.	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4111	0	0,-	592	922.841.730,-	592	922.841.730,-
2	4112	0	0,-	235	1.254.307.364,-	235	1.254.307.364,-
3	4113	3	116.938.893,-	24	14.362.087.043,-	27	14.489.024.033,-
4	4114	2	16.079.790,-	29	632.364.494,-	30	648.044.254,-
JUMLAH		5	132.818.783,-	679	17.189.400.601,-	804	17.322.017.384,-



BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN
BKPP : 4113
BANK TUNGGAL

Tanggal : 30 Des 2005
Nomor : 1
Halaman : 1

No. Urut	Penyator / Wajib Pajak	Urutan Setoran	Kode Bag. Anggaran dan Kode MAP	Jumlah Transaksi	J U M L A H (Rupiah)	Pa
1	2	3	4	5	6	
1.	BANK JATIM CABANG	Pendapatan PBB Pedesaan	1504.411311	1	25.673.000,-	
2.	BRI CABANG JEMBER / PBB	Pendapatan PBB Pedesaan	1504.411311	2	00.253.128,-	
Jumlah halaman ini				3	118.936.993,-	
Jumlah halaman sebelumnya				0	0,-	
Jumlah semua				3	118.936.993,-	



Desember 2005
KEMENTERIAN PERBENDAHARAAN UMUM

BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN
BKPP 4114
BANK TUNGGAL

Tanggal : 30 Des 2005
Nomor : 2
Halaman : 1

No. Urut	Penyetor / Wajib Pajak	Uraian Setoran	Kode Bag. Anggaran dan Kode MAP	Jumlah Transaksi	J U M L A H (Rupiah)	Pa
1	2	3	4	5	8	
1.	BANK JATIM CABANG	Pendapatan BPHTB	1504.411411	1	824.700,-	
2.	BRI CABANG JEMBER / BPHTB	Pendapatan BPHTB	1504.411411	1	14.755.090,-	
Jumlah halaman in				2	15.879.790,-	
Jumlah halaman sebelumnya				0	0,-	
Jumlah semua				2	15.879.790,-	



BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN

EKPK : 8243

BANK TUNGGAL

Tanggal : 30 Des 2005

Nomor : 8

Halaman : 1

No. Urut	SURAT PERINTAH MEMBAYAR/ YANG DIPERSAMAKAN		Kode Bagian Anggaran	Kode Kantor/ Proyek	Jumlah Pengeluaran Kotor (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Pengeluaran Bersih (Rp)
	Penerbit	Tanggal dan No					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BANK JATIM	30-12-2005 20% SPHTB LMJ	1508.0518		184.840,-	0,-	184.840,-
2.	BANK JATIM	30-12-2005 10% PBB LMJ	1508.0518		2.667.388,-	0,-	2.667.388,-
3.	BANK JATIM	30-12-2005 9% PBB LMJ	1508.0518		2.400.647,-	0,-	2.400.647,-
4.	BRI CABANG	30-12-2005 20% SPHTB JBR	1508.0512		2.951.018,-	0,-	2.951.018,-
5.	BRI CABANG	30-12-2005 10% PBB JBR	1508.0512		9.026.315,-	0,-	9.026.315,-
6.	BRI CABANG	30-12-2005 9% PBB JBR	1508.0512		8.123.681,-	0,-	8.123.681,-
Jumlah halaman ini					25.353.990,-	0,-	25.353.990,-
Jumlah halaman sebelumnya					0,-	0,-	0,-
Jumlah semua					25.353.990,-	0,-	25.353.990,-

JEMBER 30 Desember 2005
KEPAJAKSIA SEKSI BENDA-HARA UMUM
D.JASWADI
NIP.080048382

BUKU BANK

BANK TUNGGAL : BANK INDONESIA CABANG JEMBER (100)

Nomor : 1
 Halaman : 1
 Tanggal : 30 Des 2005
 Bulan : Desember 2005

No. Urut	Kode BKPP BKPK	a. SPM / SP2D c. Nota Kredit e. Berita Tambah		b. Cek/Giro Bilyet d. Nota Debet f. Berita Kurang		Penerbitan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
		a s/d f	Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5		6	7	8
							Saldo Awal	Nilai
1	8143	c	30-12-2005	10% PBB JBR		9.028.315,-	0,-	
2	8143	c	30-12-2005	10% PBB LMJ		2.667.328,-	0,-	
3	8143	c	30-12-2005	20% BPHTB JBR		2.961.019,-	0,-	
4	8143	c	30-12-2005	20% BPHTB LMJ		124.940,-	0,-	
5	8143	c	30-12-2005	201		1.023.969.677,-	0,-	
6	8143	c	30-12-2005	202		1.262.164.732,-	0,-	
7	8143	c	30-12-2005	204		1.036.209.429,-	0,-	
8	8143	c	30-12-2005	205		5.813.073,-	0,-	
9	8143	c	30-12-2005	206		102.391.023,-	0,-	
10	8143	c	30-12-2005	212		10.962.296,-	0,-	
11	8143	c	30-12-2005	213		393.292.750,-	0,-	
12	8143	c	30-12-2005	310		1.050.864.111,-	0,-	
13	8143	c	30-12-2005	9% PBB JBR		8.123.681,-	0,-	
14	8143	c	30-12-2005	9% PBB LMJ		2.400.847,-	0,-	
15	6241	d	30-12-2005	DA.07.06		0,-	4.893.051.087,-	
Jumlah halaman ini						4.893.051.087,-	4.893.051.087,-	
Jumlah halaman sebelumnya						0,-	0,-	
Jumlah semua						4.893.051.087,-	4.893.051.087,-	



Jember, 30 Desember 2005
 KEMAHASISWAAN
 MENDAHARA UMUM

Nilai

BUKU BANK
BANK TUNGGAL : SPM NIHIL (109)

Numur : 2
Halaman : 1
Tanggal : 30 Des 2006
Bulan : Desember 2006

No	Kode BKPP BKPK	a. SPM / SP2D c. Nota Kredit e. Berita Tambah		d. Cek/Giro Bilyet f. Nota Debet f. Berita Kurang		Peruntukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
		a s/d f	Tanggal	Nomor				
2	3	4	5		6	7	8	9
						Saldo Awal		Nilai
5211	a	30-12-2005	78148300/131/109		0,-	0,-		
5221	a	30-12-2005	78148450/131/109		0,-	0,-		
5811	a	30-12-2005	78148550/131/109		0,-	0,-		
5212	a	30-12-2005	78149000/131/109		0,-	0,-		
5231	a	30-12-2005	78148700/131/109		0,-	0,-		
5231	a	30-12-2005	78148800/131/109		0,-	0,-		
5211	a	30-12-2005	78148900/131/109		0,-	0,-		
5212	a	30-12-2005	78149000/131/109		0,-	0,-		
5221	a	30-12-2005	78149100/131/109		0,-	0,-		
5211	a	30-12-2005	78149200/131/109		0,-	0,-		
5212	a	30-12-2005	78149300/131/109		0,-	0,-		
5221	a	30-12-2005	78149400/131/109		0,-	0,-		
5241	a	30-12-2005	78149500/131/109		0,-	0,-		
Jumlah halaman ini						0,-	0,-	
Jumlah halaman sebelumnya						0,-	0,-	
Jumlah semua						0,-	0,-	Nilai



JEMBER, 30 Desember 2006
KEPALA SEKSI BENDAHARA UMUM

D. J. W. A. D. I
0048382

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK
UNTUK WILAYAH KERJA KPP JEMBER

Hari ini
Tgl Yang Lalu

BOSP MADANAK	Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini				Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini		Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini		Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini	
	Bank Tunggal	Bank Percobaan	Cek Pos	Pot. SPM	Trans	Rupiah	Trans	Rupiah	Trans	Rupiah
41111 Batas Penghasilan										
41112 Pajak Pertambahan Nilai										
41119 Pajak Lain-lain										
Jumlah										

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK
UNTUK WILAYAH KERJA KPP PROBOLINGGO

BOSP MADANAK	Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini				Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini		Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini		Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini	
	Bank Tunggal	Bank Percobaan	Cek Pos	Pot. SPM	Trans	Rupiah	Trans	Rupiah	Trans	Rupiah
41111 Batas Penghasilan										
41112 Pajak Pertambahan Nilai										
41119 Pajak Lain-lain										
Jumlah										

BOSP MADANAK	Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini				Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini		Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini		Jumlah Uang dan SSP/SPM/KP Hari ini Bulan ini	
	Bank Tunggal	Bank Percobaan	Cek Pos	Pot. SPM	Trans	Rupiah	Trans	Rupiah	Trans	Rupiah
41111 Batas Penghasilan										
41112 Pajak Pertambahan Nilai										
41119 Pajak Lain-lain										
Jumlah										
LAH TOTAL										

Terbilang dan diteliti
Kepala KPP / Kepala DJP

Jumlah,
Kepala Kantor

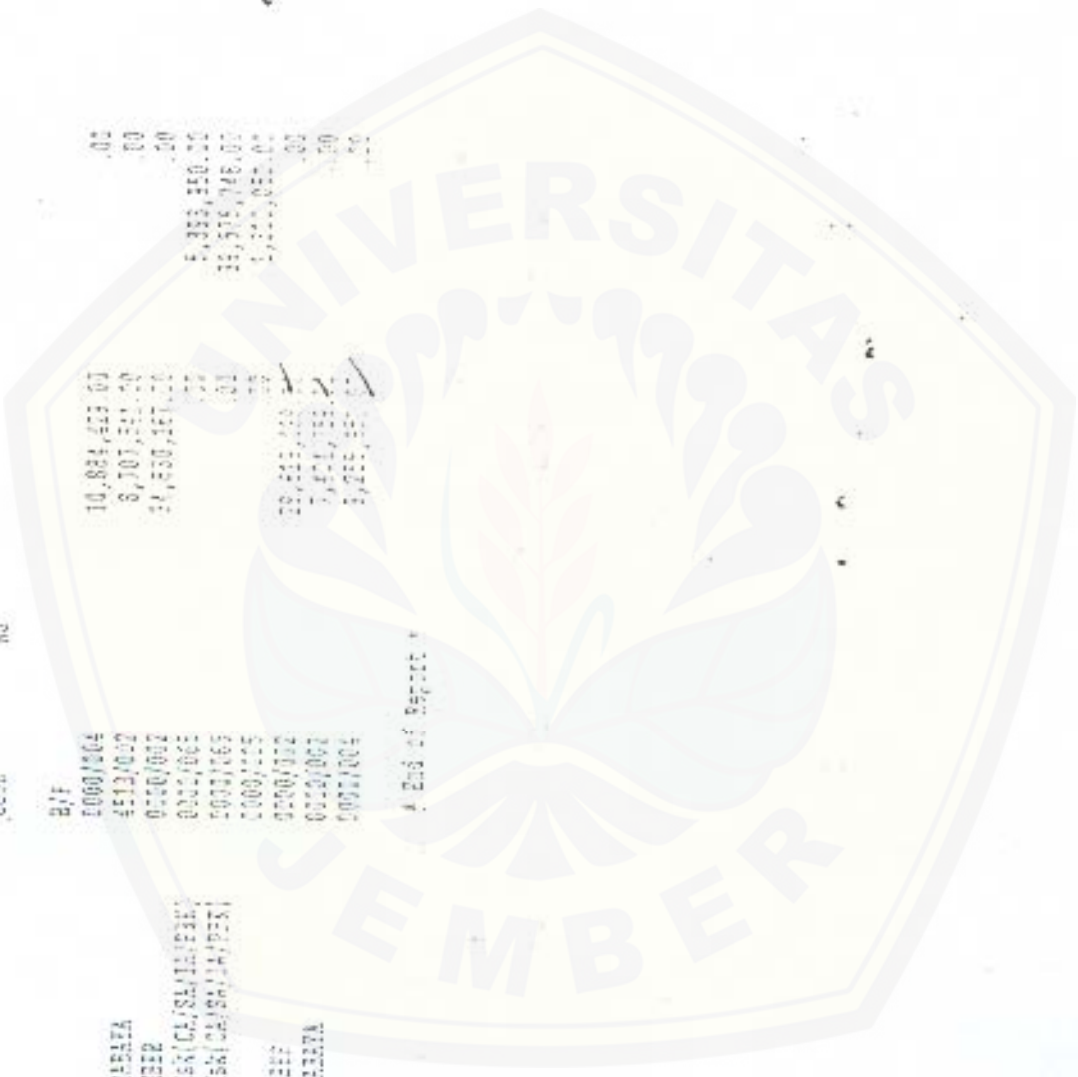
SUTOMO
NIP. 19441534

NIP.

Last Bal : 00 JEMBER

DTY DATE	TRAND DESCRIPTION	TERMS CODE	CIFORME NO	Debit	Kredit	Debit Balance	User
6	13/03/06	REKING PPS	B/F			34,422,117.00	01
	15/03/06	BANK JATIM CIB SURABAYA	1000/004	10,884,423.01	.00	43,519,705.00	0021001
	15/03/06	BANK JATIM CIB SURABAYA	4513/002	8,707,551.40	.00	34,830,167.00	0021002
	15/03/06	BANK JATIM CIB SURABAYA	0740/002	14,550,487.00	.00	20,279,679.00	0021003
	17/03/06	0750 CIB BANK (CIB SURABAYA)	0000/005	.00	5,392,310.00	25,671,989.00	0021004
	17/03/06	0000/005	5003/005	.00	28,578,748.00	28,578,748.00	0021005
	17/03/06	CA Overbooked CA	0000/005	.00	1,444,000.00	30,022,748.00	0021006
	22/03/06	BANK JATIM CIB SURABAYA	0000/002	30,022,748.00	.00	0.00	0021007
	22/03/06	BANK JATIM CIB SURABAYA	0000/002	7,444,000.00	.00	7,444,000.00	0021008
	22/03/06	REKING PPS	0000/004	7,444,000.00	.00	0.00	0021009
	22/03/06	REKING PPS	0000/004	7,444,000.00	.00	7,444,000.00	0021010

End of Report



BANK INDONESIA
040-JEMBER

B I L A S A
LAPORAN AKHIR HARI

NO. 1
PROGRAM : BIADPP
TGL : 22/03/2006
TAHUN BUKU : 05

PER TGL : 22-M A R E T-2006

REKENING KORAN NASABAH

SIFAT LAPORAN : HARIAN

NOMOR REKENING

TGL. TERAKHIR
MUTASI

SALDO AWAL
SALDO AKHIR

PRTPU. P NUMTR	ND. WARKAT	TGL. VAL MA/REK. LAM URAIAN	M U T A S I	
			D E B E T	K R E D I T
501.000000	REK. KAS NEGARA "A" JEMBER	21-03-2006		
30 002 00002	06/RC/JR/1432		00	9.255.751.00
32-03-2006	809.000040			
	PELIMP DFHTB 20 % RP/RS. 279.740.-			
**			27.662.752.000.00	00
30 001 00001	TR 41512: TCHI			
23-03-2006	809.000040			
	KAS NEGARA "A" KPPN JEMBER 0001.611.00001900			
	9 UNTUK PENYERAHAN DATA			
30 002 00007	00/RC/JR/1436			908.000.000
23-03-2006	809.000040			
	GENSIKIAN PEREMIMAN DFHTB 20%			
30 001 00005	07/JR/15/DACF/ARKV TCHI			300.000.000.00
23-03-2006	809.000040			
	BPPK UNIT PENGELOLA KEGIATAN KEC. TIRIC KAD. NS			
	UBOLINGGO			
30 001 00006	07/JR/15/DACF/ARKV TCHI			150.000.000.00
23-03-2006	809.000040			
	BPPK UNIT PENGELOLA KEGIATAN KEC. KRUJIL KAD. P			
	BUOLINGGO			
30 001 00003	06S B/JR/50/DACF/PTR TS HI			27.302.450.049.00
24-03-2006	809.000040			
	BUPIND. ESK. SALDO DEBET TS HI			
			27.869.792.000.00	00
				00

T I T A L

27.869.792.000.00

00

27.869.792.000.00

00

27.302.450.049.00

00

27.302.450.049.00

00

SENTRAL GIRO GAWUNGAN
 PT POS INDONESIA CAB. SENTRAL GIRO GAWUNGAN
 JL. PB SUDIRMAN NO 5

Kode SGG : 310-01P

KEPADA YTH :
 BENDAHARAWA UMUM
 KPKN KPN

JEMBER

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN
 Tanggal : 29-03-2006

I. SALDO AWAL PADA TANGGAL 01-03-2006 Rp. 109.

II. PENERIMAAN

KEL. MAP	JML. DOK.	JUMLAH PENERIMAAN		
		HARI INI	s/d. HARI LALU	s/d. HARI INI
0110	206	25.082.026	6.687.473.831	6.712.555.857
0130	40	18.388.542	2.779.130.790	2.797.717.332
0160	0	0	0	0
0170	5	53.250.000	1.242.960.000	1.296.210.000
0210	0	0	816.313	816.313
0310	27	957.127	112.385.419	113.342.546
TOTAL	278	97.875.695	10.822.766.353	10.920.642.048

JUMLAH PENERIMAAN S/D HARI INI Rp. 10.920.

III. JUMLAH SALDO AWAL + PENERIMAAN S/D HARI INI (I+II) Rp. 11.030.

IV. PELIMPAHAN

A. HARI INI	Rp.	0
B. S/D HARI LALU	Rp.	10.447.869.958
C. S/D HARI INI (A+B)	Rp.	10.447.869.958

V. SALDO PADA TANGGAL LAPORAN INI (III-IV.C) Rp. 582.

PT POS INDONESIA
 CAB. SENTRAL GIRO GAWUNGAN



[Handwritten Signature]

DIAH KASIH
 MANAGER GIRO

LAMPIRAN

- Laporan Rekap Nota Kredit
- Daftar Nominatif

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

REKUTASI SLIP
KPPN JEMBER

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

DIAGENDA

SELESAI

Th. Anggaran : 2005
Nomor : 81154
Tanggal : 30-12-2005

Nomor : 000008
Tanggal : 30-12-2005
Jam : 15:55:30

Tanggal : 03-01-2006
Jam : 15:55:30
Seksi : Perbendaharaan I

Jenis SPM : SPM-BP-PBB
Jumlah Diminta : 40,441,549.00
BKPK : 6111
Jenis Dokumen : ()
Kode Satker & karwas : 122096-0004
Nama Satker : KANTOR PELAYANAN PBB KAB JEMBER (Bagi Hasil PBB Prop.Jatim).
Nama Rekanan : KP PBB Jember
Alamat Rekanan : Jember
Untuk : Upah Pungut PBB untuk Propinsi.

No.	Diteruskan kepada	Konsep *)	Net
1.	PELAKSANA Tgl 30-12-2005 Jam 16.00	Diproses Tgl 30-12-2005 Jam 15.55	
2.	Korpul	Diperiksa/ditetapkan Tgl Jam 1. 2. 3.	Diperiksa/ditandatangani Tgl Jam
3.	Kepala Seksi	Ditetapkan Tgl 31-12-05 Jam 16.00 1. 2. 3.	Ditandatangani Tgl 31-12-05 Jam 16.15
4.	Sub Bagian Umum	Diberima Registrasi Tgl 2/1 Jam 16.15	Dikirim ke Seksi Bank Tgl Jam
5.	Seksi Bank		Dikirim ke Bank/BI Tgl 2/1 Jam 16.15

*) Agar diparaf pada kotak yang sesuai
1 = setuju bayar
2 = dibicarakan
3 = ditolak

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

NSS : A

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor SPM : 81154
Tanggal : 30-12-2005
Satker : 122096
KANTOR PELAYANAN PBB KAB JEMBER (Bagi Hasil PBB Prop.Jatim).

Dari : Bendahara Umum Negara
Tanggal : 02-01-2005
Nomor : 782122B / 131 / 112
Tahun Anggaran : 2005

Klasifikasi Belanja 6111 Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan

Bank/Pos BRI CABANG JEMBER di JEMBER

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 0021.01.000318.30.2 sesuai dengan

2	Giro Bank	Uang sebesar	Rp. 40.441.549,-
---	-----------	--------------	------------------

EMPAT PULUH DUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH

Kepada : Kas Daerah Propinsi Jawa Timur
NPWP : -
Nomor Rek. : 0011000477
Bank/Pos : Bank Jatim Cabang Surabaya
Yaitu : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Propinsi Jawa Timur bulan 12 tahun 2005
Kep-54/WPJ.12/KB.0705/2005 tanggal 30-12-2005

Kuasa Bendahara Umum Negara

KONSEP

JEMBER, tanggal seperti diatas
Pjs. Kepala Seksi Bendahara Umum

Kepala Seksi Perbendaharaan
ADANG SAMPOERNO
NIP. 060042807

UJANG MUNIR
NIP. 060071346



UNITAS
 PDBA, baik sebagai pendukung kegiatan pembangunan
 maupun sebagai sumber tenaga, tenaga kependidikan dan
 pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan nasional
 dan pembangunan daerah.

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 BIAYA PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 (SPM-BP-PBB)**

Lampiran ke :



Nomor : 64
 Pengeluaran Anggaran Belanja
 Tahun Anggaran : 2005
 Kelompok Belanja : 1.9.1.1.1.1.1.1

	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	JUMLAH
Dari : Menteri Keuangan Tanggal : 30-12-2005 Kode Fungsi : 1.0.1.1.1 Sub Fungsi : 1.0.1.1.6 Program : 1.0.1.1.6.1.0.1.1.3 Kode Saklar : 1.1.1.2.1.2.1.0.1.1.9.1.6 BA, Eselon I : 1.7.1.0.1.0.1.1.3 Lokal : 1.0.1.1.6.1.1.1.1.2.1 Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Dasar Pengesahan Pembayaran/Pengeluaran : a. UU Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994; b. PP Nomor 18 Tahun 2000; c. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004; d. Peraturan Menteri Nomor 34 /PMK.03/2005 e. Keputusan Menteri Nomor : Kep-54/WP/J.12/KB.0705/2005 Tanggal : 30-12-2005	Bagian Daerah : Provinsi dan Kabupaten/Kota*)	1.6.1.1.1.1.1.2.1.3 1.6.1.1.1.1.1.2.1.4	Rp 40.441.549,- Rp
		Jumlah	Rp 40.441.549,-

MEMERINTAKAN KEPADA

KPPN : 1 3 1 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember

hendaklah melakukan pembayaran dengan memindahbukukan atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum g.g PBB nomor 000318302 ke rekening Kas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) Jawa Timur pada Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 0011000477 uang sejumlah Rp 40.441.549,- (empat puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yaitu Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) bulan Desember tahun 2005 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-54/WP/J.12/KB.0705/2005 tanggal 30 Desember 2005.

Ket:
 SPM BP PBB diterbitkan secara terpisah
 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

) coret yang tidak perlu

2-1-2006 No: 782122 B



Jember, 30 Desember 2005
 AN MENTERI KEUANGAN
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB
 JEMBER
 KURNOMOPUTRO, SH
 NIP 060035439

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR
BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(SPM-BP-PBB)**

Nomor : 81154
Pengeluaran Anggaran Belanja
Tahun Anggaran : 2005
Kelompok Belanja : 6111

Dari : Menteri Keuangan Tanggal : 30-12-2005 Kode Fungsi : 01 Sub Fungsi : 06 Program : 0412 Kode Satker : 122036 BA, Eselon I : 070.03 Lokasi : 05.00 Bagian Pembiayaan dan Perhitungan	URAIAN	MATA ANGGARAN	JUMLAH
Dasar Pengesahan Pembayaran Pengeluaran : a. UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 1994; b. BP Nomor 15 Tahun 2000; c. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004; d. Peraturan Menkeu Nomor 34/PMK.03/2005; e. Keputusan Menkeu : Nomor Kep-54/WP.12/KB.0705/2005 Tanggal 30-12-2005	Bagian Daerah: Propinsi	611123	Rp. 40.441.549
	Jumlah		Rp. 40.441.549

MEMERINTAHKAN KEPADA

KPPN : (131) JEMBER

hendaklah melakukan pembayaran dengan memindahbukukan atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum q.q. PBB Nomor 000318302 ke rekening Kas Daerah Propinsi Jawa Timur pada Bank Bank Jatim Cabang Surabaya nomor 0011000477 uang sejumlah Rp. 40.441.549

(***EMPAT PULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH***)

yaitu : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Propinsi JAWA TIMUR bulan 12 tahun 2005 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-54/WP.12/KB.0705/2005 Tanggal 30-12-2005.

Jember, 30 DESEMBER 2005
A.n. Menteri Keuangan



MENTERI KEUANGAN -
REPUBLIC INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kantor Pusat
Jalan Sisinga No. 1
10110 Jakarta Pusat
Telp. (021) 5300 1234
Faks. (021) 5300 1234
www.kemendagri.go.id

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPM-PPH-PBB)	Lembar ke -	Nomor : 64 Pengeluaran Anggaran Bulanan Tahun Anggaran : 2005 Kelompok Belanja : 1.0.1.1.1.1.1	
Dari : Menteri Keuangan Tanggal : 30-12-2005 Kode Fungsi : 1.0.1.1.1 Sub Fungsi : 1.0.1.1.2 Program : 1.0.1.1.2.1.0.1.1.3.1 Kode Subkegiatan : 1.1.1.2.1.1.2.1.0.1.1.3.1 BA, Ekelon I : 1.7.1.0.1.1.0.1.1.3.1 Lokasi : 1.0.1.1.1.1.1.1.2.1	DAERAH Bagian Daerah	MEKANISME ANGGARAN	JUMLAH
Bagian Pembiayaan dari Perhitungan Dasar Pengesahan Pembayaran/Pengeluaran:	<input checked="" type="checkbox"/> Provinsi	1.8.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1	Rp 1.455.895.782,-
a. UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 b. PP Nomor 18 Tahun 2000; c. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004; d. Peraturan Menkeu Nomor 34/PMK.03/2005 e. Keputusan Menkeu Nomor : Kep-54/MPU.12/KB.0705/2005 Tanggal : 30-12-2005	<input type="checkbox"/> Kabupaten/Kota	1.6.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2	Rp
		Jumlah	Rp 1.455.895.782,-

MEMERINTAHKAN KEPADA

KPPN : 1 3 1 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember

hendaklah melakukan pembukuan sepenuhnya tanpa pengeluaran uang secara fisik sejumlah Rp. 1.455.895.782,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) pada Kelompok Belanja yang bersangkutan, yaitu : Bagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bulan Desember tahun 2005 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-54/WPJ.12/KB.0705/2005 Tanggal 30 Desember 2005 yang telah ditransfer ke rekening yang bersangkutan dari Rekening Kas Negara d.d. PBB pada Bank BRI Cabang Jember dengan nota debit masing-masing :

tanggal	02-12-2005	nomor	B.3412-2005/044.0505	sebesar	Rp 7.756.750,-
tanggal	09-12-2005	nomor	B.3478-1205/044.0505	sebesar	Rp 4.924.197,-
tanggal	18-12-2005	nomor	B.3485-1205/044.0505	sebesar	Rp 9.107.631,-
tanggal	23-12-2005	nomor	B.3602-1205/044.0505	sebesar	Rp 12.815.354,-
tanggal	26-12-2005	nomor	B.3614-1205/044.0505	sebesar	Rp 612.106.018,-
tanggal	27-12-2005	nomor	B.3636-1205/044.0505	sebesar	Rp 2.658.026,-
tanggal	28-12-2005	nomor	B.3629-1205/044.0505	sebesar	Rp 789.450.745,-
tanggal	29-12-2005	nomor		sebesar	Rp 2.274.394,-
tanggal	30-12-2005	nomor		sebesar	Rp 14.622.626,-

Jember, 30 Desember 2005

A N MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB
JEMBER

PURNOMO UTOMO, S.P.
NIP. 060036439

Telah Diperiksa
Sesuai Dengan Pembukuan KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jember
Jember, 30 Desember 2005

KANTOR PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN JEMBER



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 54/PMK.03/2005
TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 54/WPJ.12/KB.0705/2005

TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Meritimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penelitian nota debit yang diterima dari Bank Operasional III 1931 PT. BRI Cabang Jember, hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bulan Desember tahun 2005 dari Kabupaten/Kota*) Jember menunjukkan jumlah sebesar Rp 8.987.011.033,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sebelas ribu tiga puluh tiga rupiah);
 - bahwa selanjutnya pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota*) bersangkutan perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukkan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUNGAN TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

PERTAMA : Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bulan Desember tahun 2005 untuk :

- a. Pemerintah Pusat sebesar Rp 898.701.116,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu seratus enam belas rupiah)
- b. Daerah Provinsi Jawa timur sebesar Rp 1.455.895.782,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
- c. Daerah Kabupaten (Kota*) Jember sebesar Rp 5.823.583.145,- (lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- d. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 543.771.818,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
- e. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah Kabupaten (Kota) yang dibagi kepada :
 - 1) Propinsi Jawa Timur sebesar Rp 40.441.549,- (empat puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)
 - 2) Kabupaten (Kota*) Jember sebesar Rp 224.617.623,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)

sesuai dengan daftar sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini

KEDUA : Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB) dan Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB) sebagai pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Mata Anggaran sebagai berikut :-

- a. Daerah Provinsi nomor kode : 01.06.0803.

1	2	2	0	9	6
---	---	---	---	---	---

 **) 70.08.

0	5	1	2
---	---	---	---

 ***) dan MAK : 611121;



- b. Daerah Kabupaten/Kota *) nomor kode : 01.06.0803. **1 2 2 0 9 6** **) 70.08. **0 5 1 2** ***) dan MAK : 611122;
- c. Biaya Pemungutan bagian Daerah Propinsi nomor kode : 01.06.0803. **1 2 2 0 9 6** **) 70.08. **0 5 1 2** ***) dan MAK : 611123;
- d. Biaya Pemungutan bagian Daerah Kabupaten/Kota*) nomor kode : 01.06.0803. **1 2 2 0 9 6** **) 70.08. **0 5 1 2** ***) dan MAK : 611124;

KETIGA :

- a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember
- b. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
 1. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 2. Bupati/Walikota*) Kabupaten/Kota*) Jember;
 3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III di Malang ;
 4. Bank Operasional I BRI Cabang Jember di Jember;
 5. Bank/Kantor Pos Operasional III PBB BRI Cabang Jember di Jember.

Telah Diperiksa
Sesuai Dengan Pembukuan KPPN

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Desember 2005

A.N. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB
JEMBER



Umum



[Signature]
K. PURNOMOPUSIRO, SH
NIP.060035439

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 141/2005/01/001
Tanggal: 11 Mei 2005



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KANTOR WILAYAH DIP JAWA BAGIAN TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER
KABUPATEN / KOTA: JEMBER
BULAN: DESEMBER TAHUN 2005**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No. Revisi	No. A/Bulan	No. Pendaftaran P30 (PP)	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)			Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)			Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
			Pajak (10% dari 4)	Substansi Koreksi (MPPN x Tarif 4)	Biaya Pemungutan (PPN x Tarif 4)	% (dari total 10)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	% (dari total 10)	Jumlah (Rp)	% (dari total 10)
1	1/Desember	001.331.661	28.564.223	181.898.216	25.728.284	100%	2.270.808	4%	1.287.424	80%	21.851.877
2	2/Desember	1.235.001.813	14.714.921	92.242.883	13.243.429	100%	2.042.968	9%	687.171	70%	849.747
3	3/Desember	2.509.757.806	4.006.706	25.125.508	3.633.038	60%	-	-	181.822	100%	1.271.260
4	4/Desember	1.878.918.192	851.584.895	3.516.971.929	768.744.179	70%	-	-	338.373.485	100%	191.981.250
5	5/Desember	11.063.752.146	808.700.116	1.433.895.781	406.810.990	100%	-	-	80.440.549	100%	27.187.852
Jumlah			808.700.116	5.923.983.146	406.810.990	100%	-	-	544.771.918	100%	27.187.852

Jember, 30 Desember 2005
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



[Signature]
K. Purwanto
NIP. 060035439

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

02

Monor SP : 0032.0015.01.00000000
Kode dan Nama Sasaran : 000000 TERLAMPER

PUNGSI/SUBPUNGSI/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ BKPK	URAIAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BKPK	(OPKAD) DIGITEL Volume/ Lokasi	Sasaran (Bayasar)	BELANJA						KPPN RUBIK Basis
				PELAYAN	SARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN LAIN	JMLAH SELURUH	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
409659	KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER			748.222	562.550	-	-	-	1.310.812	
01.01.0170.3635	PERYELNGGARAAN PEMERIKSAAN, PENYULUHAN, PELATAPAN PENAGIHAN PAJAK DAN PENGELANAN PAJAK UJUMI DAN BANGUNAN	KD		748.222	562.550	-	-	-	1.310.812	
3635.0001	ADMINISTRASI UPJUMI	15	ORG	748.222	516.800	-	-	-	1.265.112	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	05.12		748.827	-	-	-	-	748.827	131
5122	Belanja Honorar	05.12		2.395	-	-	-	-	2.395	131
5211	Belanja Barang Operasional	05.12		-	224.731	-	-	-	224.731	131
5221	Belanja Jasa	05.12		-	96.752	-	-	-	96.752	131
5231	Belanja Pemeliharaan	05.12		-	120.720	-	-	-	120.720	131
5241	Belanja Perjalanan	05.12		-	74.607	-	-	-	74.607	131
3635.0024	PENGADAAN KASAMANDIRIHAN PERANGSAH DAYA TAHAN TURUH	1.400	OT	-	4.200	-	-	-	4.200	131
5211	Belanja Barang Operasional	05.12		-	4.200	-	-	-	4.200	131
3635.0026	POLIKLINIK/ROBAT-ROBATAN (TEKNIK HINDIRABELIM DOKTER DAN PERAWATI)	45	OT	-	3.375	-	-	-	3.375	131
5211	Belanja Barang Operasional	05.12		-	3.375	-	-	-	3.375	131
3635.0032	PENGADAAN PASIR DAN PASIR TEGAWAJ	41	PEG	-	5.125	-	-	-	5.125	131

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
II. RENCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

Nomor SP : 0037.0/015.04.0/XXV/2006
Kode dan Nama Subur : 000000 TERLAMPIR

Kategori Pembelian Detail	KPPN	B E L A N J A						Jumlah Seluruh	Catatan Pembelian Detail
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN			
5211 3635.0034	131		5.125 1.500				5.125 1.500	00	
5211 3635.0050	131		1.500 20.000				1.500 20.000	00	
5211 3635.0053	131		20.000 11.500				20.000 11.500	00	
5211	131		11.500				11.500	00	

3	4	5	6	7	8	9	10	11
URAIAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BKPR	Satuan (Register)	IKINDI/ DIS/UPU Volume/ Lokasi	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	Jumlah Seluruh	Catatan Pembelian Detail
Belanja Barang Operasional		05.12						
PENGADAAN TUGAS/FAKAS KERJA SOPIR/PESURU/PURAWAT/OKUR/SATIR/TERANGA TENNIS LAINNYA	10 01							
Belanja Barang Operasional		05.12	1.500				1.500	
PERTUKARAN PENJUALAN/PEMCO/ALH/RY/USK/ATIR S/AMALISA DATA DAN STATISTIK	5 UNIT		20.000				20.000	
Belanja Barang Operasional		05.12	20.000				20.000	
PENGAWATAN LUKU-BUKU PERATURAN/PELHAKAAN/PERALATAN BUKU & PERALATAN PERINSTANSIAN	1 TRUS		11.500				11.500	
Belanja Barang Operasional		05.12	11.500				11.500	

**DAFTAR KEGIATAN
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
Pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Jember**

Nama : Anas Firmansyah
NIM : 020803104386
Program Studi : DIII Akuntansi
Jurusan : Akuntansi

Tanggal	Uraian Kegiatan
1 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarahan magang dan penjelasan singkat mengenai sejarah dan struktur organisasi KPPN Jember. 2. Perkenalan dengan para karyawan di Seksi Perbendaharaan. 3. Mendapatkan pengarahan dan bimbingan tentang kegiatan, tugas dan wewenang di Seksi Perbendaharaan. 4. Mengisi Kartu Piutang Negara-Sewa beli rumah dinas.
2 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pengarahan dan bimbingan tentang kegiatan, tugas dan wewenang di bagian tersebut. 2. Mengklasifikasi daftar gaji berdasarkan golongan/pangkat. 3. Membantu mengisi Kartu Gaji TNI Jember.
3 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti senam pagi dan bola volly. 2. Membantu mengisi Buku Pengawasan Gaji Bulanan per Bank Operasional. 3. Membantu mengisi Kartu Gaji Pegawai Departemen Agama Lumajang dan gaji TNI.
6 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarahan dan penjelasan tentang fungsi dan tugas KPPN. 2. Membantu mengisi Kartu Gaji Pegawai Pengadilan Negeri Lumajang. 3. Membantu mengisi Kartu Gaji Polisi.
7 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Seminar dan Evaluasi kerja Per seksi di KPPN. 2. Membantu mengisi Kartu Realisasi Pencairan Dana Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. 3. Membantu mengisi Kartu Gaji Pegawai KPPN Jember.
8 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu membuat Surat Pengantar SKPP. 2. Membantu mengisi SKKP. 3. Membantu mengisi Kartu Gaji TNI Jember.
9 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti laporan pelaksanaan progam kerja dan permasalahan antar sub/seksi di KPPN. 2. Membantu membuat daftar gaji pegawai KPPN Jember bulan Juni.

10 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti senam pagi dan bola volly. 2. Membantu mengklasifikasi besar sewa-beli rumah dinas. 3. Membantu mengisi Kartu Gaji TNI Jember.
13 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dengan para karyawan di Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 2. Mendapatkan pengarahan dan bimbingan tentang kegiatan, tugas dan wewenang di bagian tersebut. 3. Membantu mengarsip konsep SP2D,SPM beserta lampirannya sesuai tanggal dan mengelompokkannya berdasarkan nama Bendaharawan Pengeluaran (mitra kerja KPPN).
14 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengarsip Kartu Laporan Rekonsiliasi Dana Anggaran. 2. Membantu mengarsip konsep SP2D,SPM beserta lampirannya sesuai tanggal dan mengelompokkannya berdasarkan nama Bendaharawan Pengeluaran (Pegawai Negeri Sipil).
15 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengarsip konsep SP2D,SPM beserta lampirannya sesuai tanggal dan mengelompokkannya berdasarkan nama Bendaharawan Pengeluaran (Universitas jember). 2. Membantu menghimpun seluruh data keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran negara yang berasal dari Seksi Perbendaharaan Umum. 3. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul laporan.
16 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengarsip konsep SP2D,SPM beserta lampirannya sesuai tanggal dan mengelompokkannya berdasarkan nama Bendaharawan Pengeluaran (TNI/POLRI). 2. Membantu menghimpun seluruh data keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran negara yang berasal dari Seksi Perbendaharaan Umum. 3. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul laporan.
17 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti senam pagi dan bola volly. 2. Membantu mengarsip konsep SP2D,SPM beserta lampirannya sesuai tanggal dan mengelompokkannya berdasarkan nama Bendaharawan Pengeluaran (mitra kerja KPPN). 3. Membantu menghimpun seluruh data keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran negara yang berasal dari Seksi Perbendaharaan Umum.
20 Maret 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dengan para karyawan di Seksi Perbendaharaan Umum. 2. Mendapatkan pengarahan dan bimbingan tentang kegiatan, tugas dan wewenang di bagian tersebut. 3. Membantu mencocokkan jumlah yang tertera pada SSP lembar ke-2 dengan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) Setoran Pajak dan mencocokkan jumlah yang tertera pada SSBP dengan DNP Setoran PNBPN. 4. Memberi stempel pada DNP dan menyerahkannya pada Kepala Seksi Perbendaharaan Umum untuk ditandatangani.

<p>21 Maret 2006</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memindahkan Daftar Perhitungan Manual BU 2003 ke Buku Pengawasan BU. 2. Membantu mencocokkan jumlah yang tertera pada SSP lembar ke-2 dengan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) Setoran Pajak dan mencocokkan jumlah yang tertera pada SSBP dengan DNP Setoran PNBP. 3. Memberi stempel pada DNP dan menyerahkannya pada Kepala Seksi Perbendaharaan Umum untuk ditandatangani. 4. Membantu menggandakan dokumen penerimaan.
<p>22 Maret 2006</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberi stempel pada Laporan Kas Posisi Harian. 2. Membantu menerima dokumen penerimaan harian dari Bank Persepsi, memeriksa kelengkapannya, dan mencatat jumlah penerimaannya. 3. Membantu mencocokkan jumlah yang tertera pada SSP lembar ke-2 dengan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) Setoran Pajak dan mencocokkan jumlah yang tertera pada SSBP dengan DNP Setoran PNBP. 4. Memberi stempel pada DNP dan menyerahkannya pada Kepala Seksi Perbendaharaan Umum untuk ditandatangani. 5. Penjelasan tentang prosedur Penatausahaan dan pembagian PBB di KPPN Jember.
<p>23 Maret 2006</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberi stempel pada Laporan Kas Posisi Harian. 2. Membantu menerima dokumen penerimaan harian dan pelimpahan dari Bank Persepsi, memeriksa kelengkapannya, serta mencatat jumlah penerimaan dan pelimpahannya. 3. Membantu mencocokkan jumlah yang tertera pada SSP lembar ke-2 dengan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) Setoran Pajak dan mencocokkan jumlah yang tertera pada SSBP dengan DNP Setoran PNBP. 4. Memberi stempel pada DNP dan menyerahkannya pada Kepala Seksi Perbendaharaan Umum untuk ditandatangani. 5. Penjelasan tentang prosedur Penatausahaan dan pembagian BPHTB di KPPN Jember.
<p>24 Mei 2005</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengikuti senam pagi dan bola volly. 3. Membantu mencocokkan jumlah yang tertera pada SSP lembar ke-2 dengan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) Setoran Pajak dan mencocokkan jumlah yang tertera pada SSBP dengan DNP Setoran PNBP. 4. Memberi stempel pada DNP dan menyerahkannya pada Kepala Seksi Perbendaharaan Umum untuk ditandatangani. 5. Membantu menyiapkan daftar pengantar pengiriman surat – surat setoran beserta SSP lembar ke-2 untuk disampaikan ke KPP. 6. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul laporan.
<p>27 Maret 2006</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dengan para karyawan di Sub Bagian Umum. 2. Mendapatkan penjelasan, pengarahan dan bimbingan tentang

	<p>kegiatan, tugas dan wewenang di bagian tersebut.</p> <p>3. Membantu mengarsip dan membuat surat balasan atas mitra kerja KPPN.</p>
28 Maret 2006	<p>1. Membuat Tanda Terima SPM.</p> <p>2. Membantu memberi stempel pada routing slip sesuai dengan jenis SPM dan mengurutkannya berdasarkan nomor urut SPM.</p> <p>3. Menyerahkan routing slip, SPM, beserta lampirannya kepada Seksi Perbendaharaan.</p>
29 Maret 2006	<p>1. Membuat Tanda Terima SPM</p> <p>2. Membantu memberi stempel pada routing slip sesuai dengan jenis SPM dan mengurutkannya berdasarkan nomor urut SPM.</p> <p>3. Membantu mengagenda surat masuk dan surat keluar serta membubuhi stempel tanda prangko berlangganan pada surat keluar atas mitra kerja KPPN.</p> <p>4. Menyerahkan routing slip, SPM, beserta lampirannya kepada Seksi Perbendaharaan.</p>
3 April 2006	<p>1. Membantu mengagenda surat masuk dan surat keluar atas mitra kerja KPPN.</p> <p>2. Ujian dan Evaluasi Praktek kerja Nyata oleh Kepala Sub Bagian Umum.</p> <p>3.</p>

**KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

Nama : ANAS FIRMANSIAN
 No. Induk Mahasiswa : 020005104500
 Program Pendidikan : AKUNTANSI
 Program Studi : D III AKUNTANSI
 Judul Laporan : Prosedur Penatausahaan dan Pemogian Pajak Bumi dan Bangunan
 dan Perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan UU. No. 10 Tahun
 2000 Pada KPPN Jember.
 Pembimbing : Indah Purnamaswati SE, N.Si, Ak.
 Tanggal Persetujuan : Mulai tanggal : s/d

No.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
	1 Maret 2000	Perubahan Judul Laporan	1.
	2 April 2000	Revisi Bab I, II, III, IV, V	2.
	22 Mei 2000	ACC	3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
			10.
			11.
			12.
			13.
			14.
			15.
			16.
			17.
			18.
			19.
			20.
			21.

